

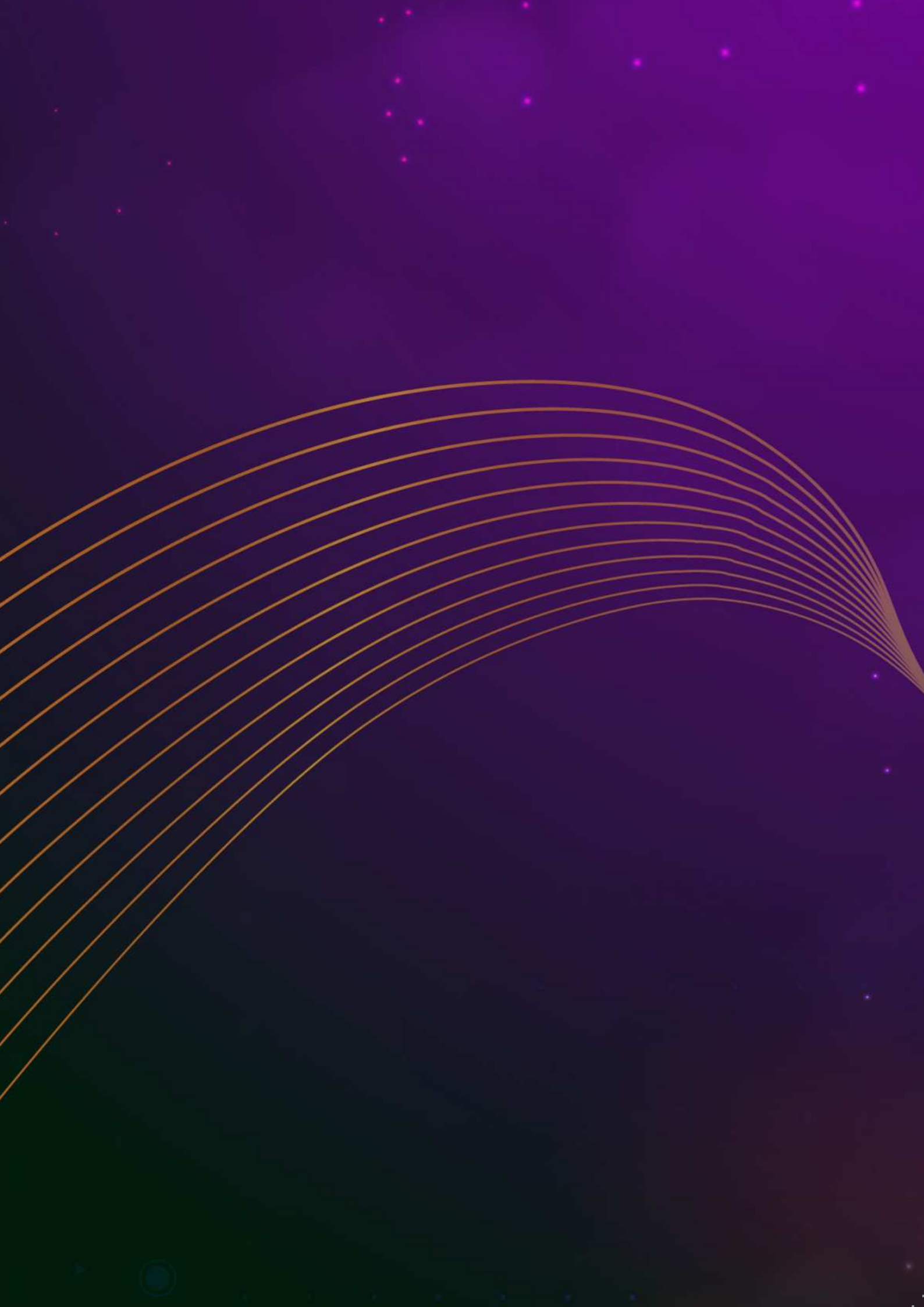
ELEVATING PERFORMANCE THROUGH COLLABORATION AND INNOVATION

MENINGKATKAN KINERJA MELALUI KOLABORASI DAN INOVASI



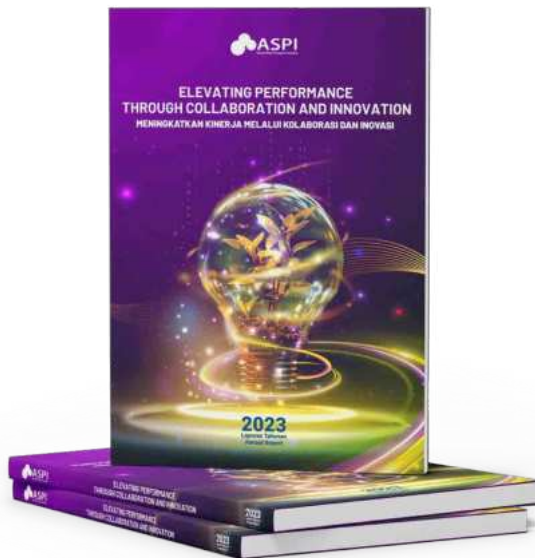
2023

Laporan Tahunan
Annual Report



PENJELASAN TEMA

THEME EXPLANATION



ELEVATING PERFORMANCE THROUGH COLLABORATION AND INNOVATION

Meningkatkan Kinerja melalui Kolaborasi dan Inovasi, dipilih sebagai tema Laporan Tahunan ASPI tahun buku 2023 dengan mendasarkan kepada kinerja ASPI yang berkomitmen kepada pengembangan dan inovasi sektor pembayaran. Dalam mewujudkan komitmen tersebut, ASPI senantiasa mengukuhkan kolaborasi, baik dengan sesama anggota, Bank Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, bahkan kolaborasi dengan negara-negara lain, untuk dapat melahirkan inovasi berbasis teknologi untuk produk dan layanan pada sistem pembayaran sehingga dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan perekonomian Indonesia secara berkelanjutan.

Enhancing Performance through Collaboration and Innovation was selected as the theme for ASPI's 2023 Annual Report, reflecting ASPI's commitment to the development and innovation of the payment sector. In fulfilling this commitment, ASPI consistently strengthens collaboration, not only with its members but also with Bank Indonesia, the Government of the Republic of Indonesia, and even with other countries, to stimulate innovation in technology, products, and services. The goal of this endeavor is to support Indonesia's sustainable economic growth.



DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

Penjelasan Tema Theme Description	2
Daftar Isi Table of Contents	3
 IKHTISAR KINERJA 2023 2023 PERFORMANCE HIGHLIGHTS	
Pencapaian Perusahaan di Tahun 2023 Company Achievements in 2023	4
Kegiatan di Tahun 2023 Activities in 2023	6
 LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT	
Laporan Badan Pengawas Report of The Supervisory Board	10
Laporan Badan Pengurus Report of The Management Board	16
 PROFIL ASPI ASPI PROFILE	
Sekilas ASPI ASPI At A Glance	24
Visi Dan Misi Vision And Mission	25
Peran dan Komitmen ASPI ASPI Role and Commitments	26
Profil Badan Pengawas Profile of Supervisory Board	27
Profil Badan Pengurus Profile of Management Board	30
Profil Direktur Eksekutif Profile of Executive Directors	36
Keanggotaan Membership	39
 LAPORAN KINERJA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA REPORT OF PERFORMANCE AND WORK PROGRAM IMPLEMENTATION	
Pengembangan dan Perluasan QRIS QRIS Development and Expansion	42
Kartu Kredit Indonesia (KKI) Fisik Physical Indonesian Credit Cards (KKI)	43
KKI Online Payment	44
Pengembangan Sistem Layanan ASPI (SiLA) Development of ASPI Service System (SiLA)	44
Pengalihan Pengelolaan Developer Site SNAP dari Bank Indonesia ke ASPI Migration of SNAP Developer Site Management from Bank Indonesia to ASPI	44
Penyusunan Persyaratan Pendaftaran Penyedia Jasa Audit TI dan Pengujian Keamanan Development of Registration Requirements for IT Audit and Security Testing Service Providers	45
Ketentuan ASPI (KASPI) ASPI Provisions (KASPI)	46
Fungsi Pengelolaan Sertifikasi & Rekomendasi Management Functions of Certification and Recommendations	46
Rapat Umum Anggota ASPI ASPI General Meeting of Members	47
Perkembangan Keanggotaan Membership Development	48
Member Engagement and Communication Program	48
 RENCANA KEGIATAN ASPI ASPI ACTIVITY PLAN	52
 TATA KELOLA ORGANISASI ORGANIZATIONAL GOVERNANCE	58
 LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL STATEMENTS	64

KILAS KINERJA 2023

PERFORMANCE HIGHLIGHTS IN 2023



SERTIFIKASI NSICCS NSICCS CERTIFICATIONS

13

Sertifikasi EDC
EDC Certifications

11

Sertifikasi Kartu
Card Certifications

3

Sertifikasi ATM
ATM Certifications

94

Sertifikasi CPT
CPT Certifications

VENDOR BARU NEW VENDORS

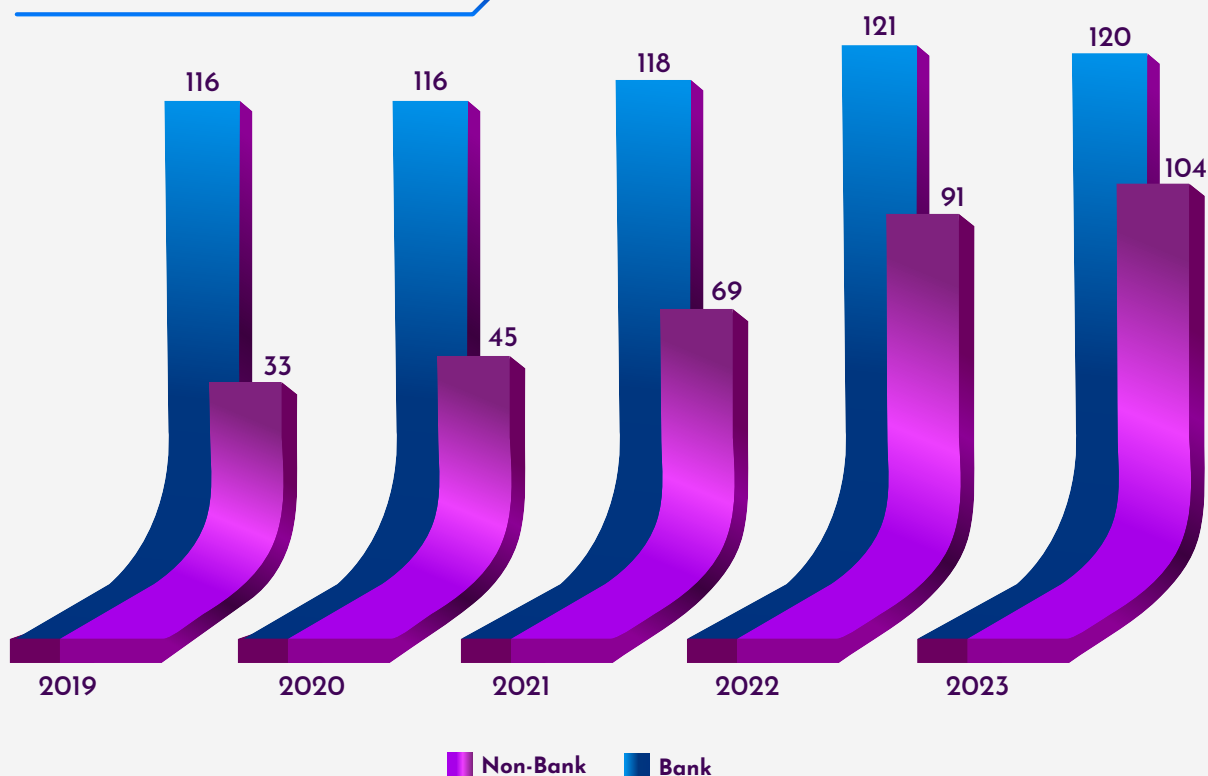
5

Vendor Terminal
Terminal Vendors

1

Vendor Kartu
Card Vendors

PERTUMBUHAN KEANGGOTAAN MEMBERSHIP GROWTH



KASPI

1. KASPI TENTANG PENGGUNAAN KARTU KREDIT INDONESIA (KKI) FISIK SEGMENT PEMERINTAH
KASPI ABOUT USE OF PHYSICAL INDONESIAN CREDIT CARDS (KKI) FOR GOVERNMENT SEGMENT
2. KASPI TENTANG PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB (*LIABILITY SHIFT*) KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBIT
KASPI ABOUT LIABILITY SHIFT FOR ATM CARDS AND/OR DEBIT CARDS



SURAT REKOMENDASI QRIS

QRIS RECOMMENDATION LETTERS

26

QRIS Merchant Presented Mode

4

QRIS Customer Presented Mode

15

QRIS Tuntas

4

QRIS KKI

35

QRIS Antarnegara Cross-Border QRIS

MALAYSIA

17

SINGAPORE

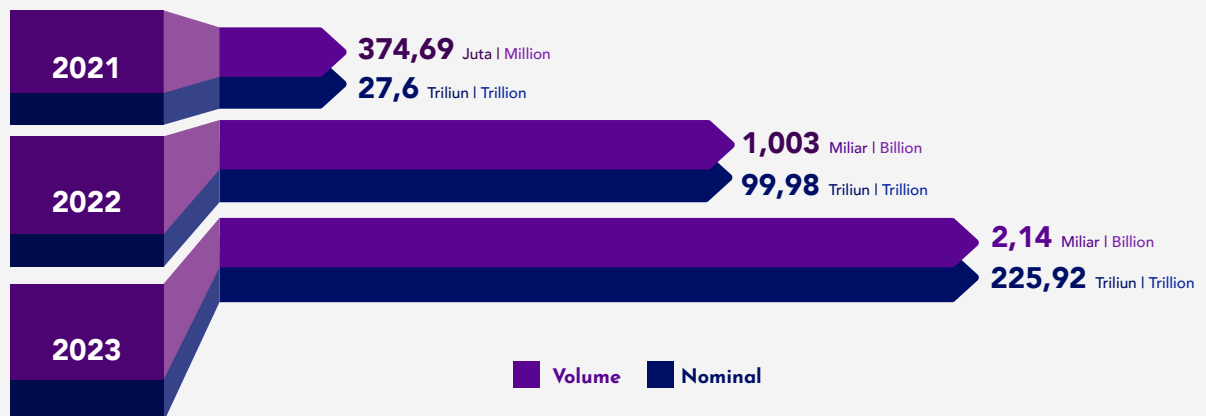
15

THAILAND

3

VOLUME TRANSAKSI QRIS

QRIS TRANSACTION VOLUME



SURAT REKOMENDASI SNAP

SNAP RECOMMENDATION LETTERS

51



PEMBUATAN IPKC

IPKC CREATION

221



KEGIATAN DI TAHUN 2023

ACTIVITIES IN 2023



APRIL APRIL

Uji coba terbatas *Production Trial Run* Kartu Kredit Indonesia (PTR KKI) Fisik Kartu di *Merchant*. Limited Production Trial Run of Indonesian Credit Cards (PTR KKI) for Physical Cards for Merchants.



APRIL APRIL

ASPI dan Bank Indonesia melaksanakan *live testing* transaksi QRIS *Cross-border* pada *merchant* di Malaysia. Live testing of Cross-Border QRIS transactions by ASPI and Bank Indonesia for merchants in Malaysia.



MEI MAY

Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 bertemakan "*Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth*". Indonesian Digital Financial Economy Festival (FEKDI) 2023 with the theme "*Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth*"



MEI MAY

Peluncuran Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan Peluncuran QRIS antarnegara Indonesia – Malaysia. Launch of the Indonesian Credit Cards (KKI) and Indonesia-Malaysia Cross-Border QRIS.



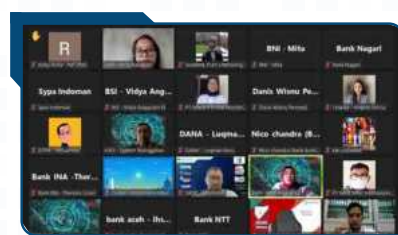
MEI MAY

Konsinyering persiapan pengelolaan SNAP dan *capacity building* pengelolaan *Developer Site*. Meeting to prepare the management of SNAP and capacity building for Developer Site management.



JUNI JUNE

Pelaksanaan Kampanye QRIS oleh Bank Indonesia bersama ASPI dan Industri bertemakan "QRIS-nya Satu, Menangnya Banyak". QRIS Campaign by ASPI and Bank Indonesia and the industry with the theme "One QRIS, Many benefits".



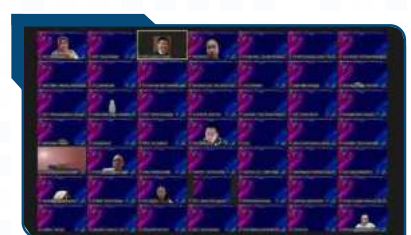
JUNI JUNE

Pelaksanaan komunikasi evaluasi MDR QRIS kepada *merchant* Usaha Mikro (UMI). MDR QRIS evaluation communication with Micro Business merchants (UMI).



JUNI JUNE

Rapat Umum Anggota (RUA) ASPI Tahunan 2023. 2023 Annual General Meeting of Members (AGM) of ASPI



JUNI JUNE

Diskusi bersama ASPI dan Anggota mengenai penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Pelindungan Konsumen. ASPI discussion with Member representatives on the plan to issue PBI on Consumer Protection.



AGUSTUS AUGUST

Sosialisasi KASPI Tentang Pengalihan Tanggung Jawab (*Liability Shift*) Kartu ATM dan/atau Kartu Debit.
KASPI Awareness Campaign on ATM Card and/or Debit Card Liability Shift.



AGUSTUS AUGUST

Production Trial Run (PTR) Interkoneksi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Online Payment tahap 1.
Production Trial Run (PTR) of Indonesian Credit Cards (KKI) Interconnection for Online Payments (Phase 1).



AGUSTUS AUGUST

ASPI bersama Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kantor Staf Kepresidenan, dan industri, dalam *Focus Group Discussion (FGD) Studi QR Code* di Indonesia yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), *Strategic ASEAN International Advocacy and Consultancy (SAIAC)*, dan Policy.
Focus Group Discussion (FGD) Study of QR Code in Indonesia organized by the University of Indonesia Alumni Association (ILUNI UI), Strategic ASEAN International Advocacy and Consultancy (SAIAC), and Policy attended by ASPI, Bank Indonesia, the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment, the Presidential Staff Office, and the industry.



AGUSTUS AUGUST

Edukasi KASPI Tentang Penyusunan Materi Edukasi Untuk *Merchant* dan Pengguna QRIS.
KASPI Education Program on Preparation of Educational Materials for Merchants and QRIS Users.



AGUSTUS AUGUST

Sosialisasi PBI Pelindungan Konsumen.
Awareness Campaign of PBI Consumer Protection.



AGUSTUS AUGUST

Sosialisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah kepada 15 Kementerian/Lembaga.
Awareness Campaign of Indonesian Credit Cards (KKI) for Government Segment to 15 Ministries / Institutions.



NOVEMBER NOVEMBER

Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUA-LB) ASPI.
ASPI Extraordinary General Meeting of Members (RUA-LB).



NOVEMBER NOVEMBER

Launching QR Antarneegara (Cross-border) Indonesia dan Singapura, pada acara *Singapore Fintech Festival (SFF)*.
Launch of Cross-Border QR payment between Indonesia and Singapore, at the Singapore Fintech Festival (SFF) event.

01

LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT







“Badan Pengawas menilai bahwa di sepanjang tahun 2023, Badan Pengurus telah memberikan kontribusi terbaik dengan kinerja yang optimal melalui pencapaian target-target rencana kerja yang telah ditetapkan di tahun sebelumnya.

The Supervisory Board considered that throughout 2023, the Management Board made the best contribution with optimal performance through the achievement of the work plan targets set in the previous year. Therefore, the duties and responsibilities of the management have been satisfactorily carried out.

”

Kartika Wirjoatmodjo

Ketua Badan Pengawas
Chairman of Supervisory Board

LAPORAN BADAN PENGAWAS

SUPERVISORY BOARD REPORT

Bapak dan Ibu Anggota ASPI yang kami hormati,

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya, kita dapat menyelesaikan tugas dan program kerja tahun 2023 dengan baik. Mewakili jajaran Badan Pengawas, saya menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan Badan Pengawas atas kinerja kepengurusan ASPI untuk tahun buku 2023.

Pada tahun 2023, secara umum perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan dan mampu tumbuh dengan baik di tengah dinamika perekonomian global yang juga dipengaruhi oleh kondisi geopolitik dunia, perubahan struktur demografi, dan transformasi digital di berbagai bidang khususnya di sektor keuangan. Pertumbuhan berkelanjutan perekonomian Indonesia tersebut diiringi dengan stabilitas yang dihasilkan melalui implementasi bauran kebijakan nasional yang disusun oleh pemerintah dan Bank Indonesia.

Salah satu faktor pendukung pertumbuhan perekonomian nasional 2023 yang tetap tinggi adalah karena menguatnya permintaan domestik yang disebabkan oleh peningkatan konsumsi Rumah Tangga dan Pemerintah. Salah satu indikator dari pertumbuhan ini adalah aktivitas transaksi sistem pembayaran. Mengacu kepada data yang dirilis oleh Bank Indonesia pada tahun 2023 terdapat pertumbuhan instrumen dan kanal pembayaran yang signifikan, terutama Uang Elektronik dan QRIS yang disertai dengan peningkatan *volume* dan nilai transaksi pembayaran. Selain itu, pengenalan atas berbagai, produk dan bisnis model baru juga memberikan pilihan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran secara cepat, mudah, murah dan handal.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA ASPI

Badan Pengawas menilai bahwa di sepanjang tahun 2023, Badan Pengurus telah memberikan kontribusi terbaik dengan kinerja yang optimal melalui pencapaian target-target rencana kerja yang telah ditetapkan di tahun sebelumnya. Oleh karena itu tugas dan tanggung jawab kepengurusan telah dilaksanakan dengan baik.

Badan Pengawas berpendapat bahwa, secara berkesinambungan inisiatif dan program-program yang dilaksanakan oleh ASPI sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia sebagaimana tertuang dalam *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025, dan dalam rangka mendukung program digitalisasi pemerintah.

Dear Esteemed Members of ASPI,

Praise and gratitude to God Almighty for His blessings and grace that we successfully completed our duties and work program for the year 2023. On behalf of the Supervisory Board, allow me to present a report on the implementation of the Supervisory Board's duties on ASPI's management performance for the fiscal year 2023.

In 2023, the Indonesian economy demonstrated resilience and was able to grow well amidst the dynamics of the global economy which was also influenced by world geopolitical conditions, changes in demographic structure, and digital transformation in various fields, especially in the financial sector. The sustainable growth of the Indonesian economy was accompanied by stability resulting from the implementation of a consolidation of national policies formulated by the government and Bank Indonesia.

One of the factors supporting the high growth of the national economy in 2023 was the strengthening of domestic demand driven by an increase in household and government consumption. One indicator of this growth was payment system transaction activity. Referring to data released by Bank Indonesia in 2023, there was significant growth in payment instruments and channels, especially Electronic Money and QRIS, accompanied by an increase in the volume and value of payment transactions. In addition, the introduction of various new products and business models also provided options for the public in making payment transactions fast, easy, affordable, and reliable.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF ASPI

The Supervisory Board assesses that throughout 2023, the Executive Board made the best contribution with optimal performance through the achievement of the work plan targets set in the previous year. Therefore, the duties and responsibilities of the management have been satisfactorily carried out.

The Supervisory Board is of the opinion that the initiatives and programs implemented by ASPI were in line with Bank Indonesia's policies as stated in the Indonesian Payment System Blueprint 2025 and supportive of the government's digitization program.



Sebagai *Self Regulatory Organization* (SRO), sepanjang tahun 2023 ASPI telah menjalankan berbagai kegiatan sebagai upaya untuk mendukung Bank Indonesia dalam menjaga kelancaran dan kemajuan sistem pembayaran nasional antara lain melalui penerbitan berbagai ketentuan teknis dan mikro berupa Ketentuan ASPI (KASPI) yang menjadi acuan bagi para pelaku di industri sistem pembayaran.

Lebih jauh dalam tahun 2023 ASPI juga telah diberikan kepercayaan untuk menjalankan tugas baru yaitu melaksanakan pengelolaan *developer site Standar Open API* untuk Pembayaran atau dikenal dengan sebutan SNAP, yang merupakan standar yang dibangun sebagai jembatan harmonisasi antara bank dan *fintech* serta untuk mendorong inovasi dalam sistem pembayaran. Dengan dialihkannya fungsi pengelolaan *developer side* dari Bank Indonesia kepada ASPI, ASPI diharapkan dapat mendukung percepatan integrasi dan transformasi digital dalam industri pembayaran.

Di sepanjang tahun 2023, Bank Indonesia bersama ASPI terus berupaya untuk mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan telah mengembangkan interkoneksi QRIS antarnegara dengan Malaysia dan Singapura yang secara resmi diimplementasikan mulai Mei 2023 dengan Malaysia dan November 2023 dengan Singapura, kerja sama serupa sebelumnya dilakukan dengan *Bank of Thailand* (BoT) pada tahun 2022.

ASPI juga telah memberikan kontribusi yang signifikan atas keberhasilan dan popularitas QRIS yang terlihat dari kinerja transaksi dimana telah tercatat pertumbuhan 130% dengan nominal transaksi QRIS mencapai Rp230 triliun dalam tahun 2023. Sedangkan jumlah pengguna QRIS telah meningkat lebih dari 50% mencapai 46 juta bila dibanding dengan periode yang sama ditahun sebelumnya, sementara jumlah *merchant* tercatat 30,4 juta.

Sebagai mitra strategis Bank Indonesia, ASPI telah menjalankan peran dalam mendukung berbagai kebijakan dan inisiatif Bank Indonesia, sekaligus menyuarakan masukan anggota ASPI (*voice of industry*) kepada Bank Indonesia secara konstruktif dan profesional, sesuai peran ASPI sebagai perwakilan industri Sistem Pembayaran Indonesia.

TATA KELOLA ORGANISASI

Badan Pengawas menilai bahwa berbagai upaya telah ditempuh oleh Badan Pengurus dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang akuntabel, transparan, dan profesional. Ke depannya, Badan Pengawas dan Badan Pengurus akan selalu berkomitmen untuk menerapkan

As a Self Regulatory Organization (SRO), ASPI carried out various activities throughout to support Bank Indonesia in maintaining the smooth operation and the advancement of the national payment system, including through the issuance of various technical and micro provisions in the form of ASPI Provisions (KASPI) serve as guidelines for stakeholders in the payment system industry.

Furthermore, In 2023 ASPI was also entrusted with a new task of managing developer site for the Open API Standard for payments, known as SNAP. This standard was developed to bridge the harmonization between banks and fintech to foster innovation in the payment system. With the transfer of the developer side management function from Bank Indonesia to ASPI, ASPI is expected to support the acceleration of integration and digital transformation in the payment industry.

Throughout 2023, Bank Indonesia together with ASPI continued to push the acceleration of payment system digitization and had developed cross-border QRIS interconnection with Malaysia and Singapore, which was officially implemented starting May 2023 with Malaysia and November 2023 with Singapore. Similar cooperation was previously carried out with the Bank of Thailand (BoT) in 2022.

ASPI has also made a significant contribution to the success and popularity of QRIS where the transaction grew 130% with transaction value reaching Rp230 trillion in 2023. Meanwhile, the number of QRIS users increased by more than 50% reaching 46 million, compared to the same period in the previous year when the number of merchants recorded at 30.4 million.

As a strategic partner of Bank Indonesia, ASPI has played a role in supporting various Bank Indonesia policies and initiatives, as well as providing constructively and professionally, feedback of ASPI's members (*voice of industry*) to Bank Indonesia. This aligns with ASPI's role as a representative of the Indonesian Payment System industry.

ORGANIZATIONAL GOVERNANCE

The Supervisory Board considered that various efforts had been undertaken by the Management Board in realizing accountable, transparent and professional organizational governance. Going forward, the Supervisory Board and the Management Board are committed to implementing

prinsip tata kelola organisasi yang baik di setiap aspek dalam organisasi.

PANDANGAN ATAS PROSPEK KE DEPAN

Transaksi ekonomi dan keuangan digital diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan modernisasi teknologi dan kemajuan sistem pembayaran digital yang tentunya akan menciptakan berbagai inovasi dan solusi pembayaran.

ASPI berkomitmen untuk selalu berjalan searah dengan kebijakan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia dan secara terus menerus meningkatkan dan mengembangkan produk dan layanan pembayaran terkini, antara lain pembayaran bermetode nirsentuh baik dengan menggunakan teknologi NFC maupun teknologi chip serta produk berbasis tokenisasi, guna memenuhi kebutuhan industri dan pelaku system pembayaran serta masyarakat luas akan solusi pembayaran yang semakin memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi.

Disamping itu, untuk memperluas akseptasi QRIS di luar negeri ASPI menargetkan kerja sama dengan beberapa negara lainnya seperti Jepang, India, Korea dan Tiongkok, yang bertujuan untuk mendorong pembayaran lintas negara yang lebih cepat, lebih mudah, lebih transparan, serta lebih inklusif. Inisiatif ini diyakini akan mendukung aktivitas perekonomian, termasuk sektor pariwisata, serta mendukung stabilitas makroekonomi dengan mendorong penggunaan mata uang lokal secara lebih luas. Kerjasama *QRIS Cross-border* ini memerlukan pengembangan infrastruktur pembayaran yang sarat dengan konsep interoperabilitas, interkoneksi, dan integrasi.

Dengan adanya penambahan dua komite, yang salah satunya menangani perlindungan konsumen, hal ini akan menjadi perhatian ASPI dan menjadi bagian dari program kerja ASPI di tahun 2024.

Kemajuan dalam sistem pembayaran Indonesia ini tentunya harus diimbangi dengan penguatan kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, Badan Pengawas mendukung rencana ASPI untuk mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Sistem Pembayaran Indonesia guna mendukung Anggota ASPI dalam memenuhi kebutuhan sertifikasi bagi SDM unggul di bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU P2SK Peraturan Bank Indonesia.

the principles of good organizational governance in every aspect of the organization.

OUTLOOK ON FUTURE PROSPECTS

Digital economic and financial transactions are expected to continue to increase along with technological modernization and advancements in digital payment systems which will certainly create various innovations and payment solutions.

ASPI is committed to consistently aligning with the policies of the Indonesian Payment System Blueprint and continuously enhancing and developing the latest payment products and services, including contactless payment methods using both NFC and chip technology, as well as tokenization-based products, to meet the needs of the industry and payment system stakeholders. These solutions aim to provide greater convenience and speed in transactions for the wider community.

In addition, to expand QRIS acceptance overseas ASPI plan to collaborate with several other countries such as Japan, India, Korea and China, to facilitate faster, easier, more transparent, and more inclusive cross border payments. This initiative is believed to support economic activity, including the tourism sector, and support macroeconomic stability by promoting broader use of local currencies. This cross-border QRIS cooperation requires the development of a payment infrastructure that is loaded with the concepts of interoperability, interconnection, and integration.

With the addition of two committees, one of which handles consumer protection, this will be ASPI's focal point and become part of ASPI's work program in 2024.

This progress in the Indonesian payment system must certainly be accompanied by strengthening human resources competencies. Therefore, the Supervisory Board supports ASPI's plan to establish the Indonesian Payment System Professional Certification institution to support ASPI Members in meeting the certification requirements for more competent human resources in the field of Payment Systems and Rupiah Management (SPPUR) in accordance with the provisions as stipulated in the Bank Indonesia Regulation P2SK Law.

APRESIASI

Mewakili Badan Pengawas, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Badan Pengurus dan seluruh tim operasional ASPI atas komitmen dan dedikasi terbaiknya sehingga program-program di sepanjang tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih pula saya sampaikan, atas nama Badan Pengawas ASPI, kepada Bank Indonesia dan seluruh anggota ASPI yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada kami, serta untuk kesungguhan dalam berkolaborasi dengan ASPI. Kami berharap ASPI dapat terus mengawal kemajuan industri pembayaran nasional, serta mendukung pelaksanaan inisiatif *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025/2030.

APPRECIATION

On behalf of the Supervisory Board, I would like to express our highest appreciation to the Management Board and the entire ASPI operational team for their commitment and dedication so that the programs throughout 2023 were successfully implemented. Our gratitude also goes to Bank Indonesia and all ASPI members for their trust, support, and their commitment to collaborating with ASPI. We hope that ASPI can continue to oversee the progress of the national payment industry and support the implementation of the Indonesian Payment System Blueprint 2025/2030 initiative.

Jakarta, Juni | June 2024

Atas Nama Badan Pengawas | On behalf of the Supervisory Board

Kartika Wirjoatmojo

Ketua Badan Pengawas | Chairman of Supervisory Board

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank



“ Perkembangan pesat instrumen dan kanal pembayaran digital mendorong peningkatan volume transaksi pembayaran secara signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan total volume transaksi QRIS dari periode Januari-Desember 2023 mencapai 2,14 miliar transaksi dan mencatat pertumbuhan sebesar 113% dibanding total volume transaksi pada periode tahun sebelumnya.

The rapid development of digital payment instruments and channels has significantly increased the volume of payment transactions as evidenced by the total QRIS transaction volume from the January-December 2023 period of 2.14 billion transactions, recording a growth of 113% compared to the total transaction volume in the previous year.

“



Santoso

Ketua Badan Pengurus
Chairman of Management Board

LAPORAN BADAN PENGURUS MANAGEMENT BOARD REPORT

Anggota ASPI yang kami hormati,

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan karunia-Nya, ASPI dapat melalui tahun 2023 ini dengan baik dan dapat berkontribusi kepada perekonomian Indonesia, khususnya industri sistem pembayaran, melalui berbagai pencapaian penting dan pelaksanaan program kerja ASPI. Mewakili Badan Pengurus, perkenalkan saya melaporkan ringkasan kinerja ASPI untuk tahun buku 2023.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2023 menghadapi berbagai ketidakpastian yang diakibatkan gejolak geopolitik dan perekonomian global. Namun, di tengah tantangan dan ketidakpastian tersebut, kita patut bersyukur bahwa perekonomian Indonesia tetap dapat bertumbuh dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5% pada tahun 2023. Berbagai faktor yang mendukung pertumbuhan perekonomian ini antara lain konsumsi swasta dan investasi yang meningkat, yang didukung oleh berbagai stimulus kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk mendorong transformasi *digital* di sektor keuangan.

Transformasi *digital* di sektor keuangan, khususnya di industri sistem pembayaran terus ditempuh melalui berbagai inovasi pada instrumen dan kanal pembayaran, bisnis model serta perluasan layanan pembayaran *digital*, yang dilaksanakan sejalan dengan penguatan di sisi regulasi. Hal ini dalam rangka menciptakan struktur industri sistem pembayaran nasional yang sehat, kompetitif dan efisien, serta terselenggaranya infrastruktur sistem pembayaran yang cepat, aman, dan andal. Pergeseran struktur demografi di Indonesia, ditunjukkan dengan meningkatnya proporsi generasi milenial dan generasi Z dengan jumlah total 64,2% dari populasi juga menjadi salah satu *drivers* yang mengakselerasi transformasi *digital* di sistem pembayaran disamping meningkatnya tuntutan masyarakat akan sistem pembayaran yang cepat, aman dan terjangkau. Perkembangan pesat instrumen dan kanal pembayaran digital mendorong peningkatan *volume* transaksi pembayaran secara signifikan.

Total *volume* transaksi QRIS dari Januari-Desember 2023 mencapai 2,14 miliar transaksi dan mencatat pertumbuhan sebesar 113% dibanding total *volume* transaksi periode Januari-Desember tahun 2022 dengan total nominal mencapai Rp 226 triliun atau tumbuh sebesar 126%

Dear Esteemed ASPI Members,

Praise and gratitude to God Almighty for His blessings that ASPI was able to successfully go through 2023 and managed to contribute to the Indonesian economy, especially in the payment system industry, through various important achievements and implementation of ASPI's work programs. On behalf of the Executive Board, allow me to present a summary of ASPI's performance for the financial year 2023.

The Indonesian economy faced various uncertainties caused by geopolitical and global economic turmoil in 2023. Nevertheless, in the midst of such challenges and uncertainties, we should be grateful that the Indonesian economy managed to record growth in the range of 5% in 2023. Various factors that supported this economic growth include increased private consumption and investment, which were supported by various policy stimuli issued by the government, including encouraging digital transformation in the financial sector.

Digital transformation in the financial sector, especially in the payment system industry, continued to be pursued through various innovations in payment instruments and channels, business models and expansion of digital payment services, which were carried out in line with strengthening on the regulatory aspect. These were implemented to create a healthy, competitive and efficient national payment system industry structure, as well as the implementation of a fast, safe and reliable payment system infrastructure. The shifting demographic structure in Indonesia, shown by the increasing proportion of millennials and generation Z with a total of 64.2% of the population, was also one of the drivers that accelerated digital transformation in the payment system in addition to the increasing public demand for a fast, safe and affordable payment system. The rapid development of digital payment instruments and channels significantly increased the volume of payment transactions.

The total transaction volume of QRIS for the January-December 2023 period reached 2.14 billion transactions and recorded a growth of 113% compared to the total transaction volume of the January-December 2022 period with a total nominal value of IDR 226 trillion or an increase



dibandingkan tahun 2022. Jumlah *merchant* QRIS per akhir Desember 2023 mencapai 30,4 juta *merchant* atau mencatat pertumbuhan sebesar 26,9% dibandingkan posisi akhir Desember 2022 dan sebagian besarnya adalah UMKM. Jumlah User QRIS juga tumbuh signifikan dan per akhir Desember 2023 sdh mencapai 45,6 juta pengguna atau tumbuh sebesar 58,5% dibandingkan posisi akhir Desember 2022. Hal ini menunjukkan adopsi QRIS yang terus meningkat sebagai metode pembayaran yang dipilih masyarakat.

Per akhir Des 2023, jumlah Uang Elektronik (UNIK) beredar mencapai 810 juta atau tumbuh sebesar 10,8 % dibandingkan posisi akhir Des 2022. Total *volume* transaksi UNIK pada 2023 mencapai 20,4 miliar transaksi atau naik 65,5% dibanding tahun 2022 dengan total nominal mencapai Rp 1.860 triliun atau naik 57,9% dibanding tahun 2022.

Akselerasi *volume* dan nilai transaksi sistem pembayaran digital juga dilakukan untuk transaksi keuangan pemerintah. Bank Indonesia bersama pemerintah dan industri juga memperkuat implementasi dan akseptasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah, yang diluncurkan pada Agustus 2022 dan pada tahun 2023, Bank Indonesia berfokus pada upaya mendorong akseptasinya yaitu melalui fitur QRIS dan kartu fisik sehingga pemerintah saat ini dengan mudah dapat melakukan transaksi baik *offline* maupun *online*.

KINERJA TAHUN 2023

Pada tahun 2023, ASPI telah menjalankan berbagai program kerja yang sudah direncanakan bersama dengan para pemangku kepentingan sistem pembayaran Indonesia di tahun sebelumnya.

Sesuai dengan perannya sebagai *Self Regulatory Organization* (SRO), ASPI telah menerbitkan dan mensosialisasikan Ketentuan ASPI (KASPI) pada tahun 2023 yaitu tentang Pengalihan Tanggung Jawab (*Liability Shift*) kartu ATM dan/atau Kartu Debit untuk memberikan panduan dan aturan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul bilamana terjadi transaksi tindak kejahatan dan/ atau penyalahgunaan kartu ATM dan/ atau Kartu Debit palsu akibat belum diterapkannya teknologi *chip*. Selain itu ASPI juga menerbitkan KASPI Penggunaan KKI Fisik Segmen Pemerintah dan KASPI Penggunaan KKI Fisik Segmen Pemerintah yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan KKI Fisik Segmen Pemerintah dan mengatur tanggung jawab para pihak atas risiko yang timbul dalam hal terjadi tindak kejahatan dan/ atau penyalahgunaan KKI Fisik Segmen Pemerintah.

of 126% compared to 2022. The number of QRIS merchants as of the end of Dec 2023 reached 30.4 million merchants or recorded a growth of 26.9% compared to the end of Dec 2022, most of them being MSMEs. The number of QRIS users also grew significantly and as of the end of Dec 2023 had reached 45.6 million users or grew by 58.5% compared to the end of Dec 2022. This shows the increasing adoption of QRIS as the payment method chosen by the public.

As of the end of Dec 2023, the number of Electronic Money (UNIK) in circulation reached 810 million or grew by 10.8% compared to the end of Dec 2022. The total volume of UNIK transactions in 2023 reached 20.4 billion transactions or an increase of 65.5% compared to 2022 with a total nominal value of IDR 1,860 trillion or an increase of 57.9% compared to 2022.

Acceleration of the volume and value of digital payment system transactions was also carried out for government financial transactions. Bank Indonesia together with the government and industry players also strengthened the implementation and acceptance of the Indonesian Credit Card (KKI) for the Government segment, which was launched in August 2022 and in 2023, Bank Indonesia focused on efforts to encourage its acceptance through the QRIS feature and physical cards so that the government can now easily make transactions both offline and online.

2023 PERFORMANCE

In 2023, ASPI carried out various work programs that had been planned together with Indonesian payment system stakeholders in the previous year.

In accordance with its role as a Self-Regulatory Organization (SRO), ASPI issued and familiarized the ASPI Provisions (KASPI) in 2023, namely on Liability Shift for ATM Cards and/ or Debit Cards to provide guidance and rules in determining the party responsible for losses that may arise in the event of a criminal transaction and/or misuse of counterfeit ATM cards and/or Debit Cards due to the non-implementation of chip technology. In addition, ASPI also issued KASPI for the Use of Government Segment Physical KKI and KASPI for the Use of Government Segment Physical KKI which aims to support the implementation of the Government Segment Physical KKI and regulate the responsibilities of the parties for the risks arising in the event of crime and / or misuse of Government Segment Physical KKI.

Sebagai upaya untuk mewujudkan komitmen dalam mendorong kolaborasi pelaku industri sistem pembayaran, Bank Indonesia bersama ASPI dan industri, telah mengembangkan *Standar Open API* untuk Pembayaran (SNAP) yang mulai diimplementasikan pada pertengahan tahun 2022 untuk membangun harmonisasi dan *linkage* antara bank dan *fintech* serta mendorong inovasi dalam sistem pembayaran, dimana pada akhirnya akan menciptakan ekosistem sistem pembayaran yang berintegritas. Pada tahun 2023 ASPI mulai melaksanakan mandat baru dari Bank Indonesia yaitu pengalihan pengelolaan *developer site* SNAP dari Bank Indonesia kepada ASPI sebagai lembaga standar dalam sistem pembayaran di Indonesia. Kebijakan tersebut ditujukan untuk makin mendorong perluasan layanan dan adopsi SNAP sehingga dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan inovasi sektor pembayaran di Indonesia ke depannya.

Di sepanjang tahun 2023, ASPI juga telah mengeluarkan 94 surat persetujuan yang meliputi sertifikasi untuk Kartu CPT (*Card Perso Test*), kartu terminal Debit/ATM, dan memberikan 51 Surat Rekomendasi QRIS untuk anggotanya.

Sebagai upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat baik konsumen maupun *merchant*, ASPI bersama Bank Indonesia, dan industri sistem pembayaran menyusun strategi komunikasi dan melaksanakan kegiatan edukasi mengenai QRIS yang dimulai pada bulan Juni 2023. Program edukasi ini mencakup antara lain manfaat, fitur dan keamanan bertransaksi menggunakan QRIS. ASPI juga terlibat aktif dalam kampanye Perlindungan Konsumen (PEKA) yang diinisiasi Bank Indonesia.

Pada tahun 2023, ASPI kembali ditunjuk sebagai mitra utama Bank Indonesia dalam penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2023 (FEKDI) yang mengusung tema "*Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth*" yang diselenggarakan pada 7-10 Mei 2023 di *Jakarta Convention Centre*, Jakarta. ASPI bersama Asosiasi lain berperan aktif dalam pelaksanaan rangkaian acara tersebut yang menampilkan berbagai pembicara serta inovasi terbaru dalam sistem pembayaran.

PROSPEK KINERJA TAHUN 2024

Menghadapi peluang dan tantangan di tahun 2024, ASPI telah menyusun program kerja tahun 2024 yang secara konsisten mendukung implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 serta mempertimbangkan berbagai masukan anggota dan inisiatif strategis serta perkembangan di Sistem Pembayaran *regional* maupun *global*. ASPI akan berkolaborasi secara intensif dengan anggota dan *stakeholders* terkait di sistem pembayaran melalui berbagai perencanaan kegiatan yaitu antara

In an effort to realize the commitment to encourage collaboration of payment system industry players, Bank Indonesia together with ASPI and the industry developed an Open API Standard for Payments (SNAP) which began to be implemented in mid-2022 to build harmonization and linkage between banks and fintech and encourage innovation in the payment system, which ultimately creates a payment system ecosystem with integrity. In 2023, ASPI began implementing a new mandate from Bank Indonesia, namely the transfer of SNAP developer site management from Bank Indonesia to ASPI as a standard institution in the payment system in Indonesia. The policy is intended to further encourage the expansion of SNAP services and adoption so as to improve the efficiency, security and innovation of the payment sector in Indonesia going forward.

Throughout 2023, ASPI also issued 94 approval letters covering certification for CPT (Card Perso Test) Cards, Debit/ATM terminal cards, and provided 51 QRIS Recommendation Letters for its members.

As an effort to increase public literacy of both consumers and merchants, ASPI together with Bank Indonesia and the payment system industry developed a communication strategy and carried out educational activities regarding QRIS starting in June 2023. This education program covers, among others, the benefits, features and security of transactions using QRIS. ASPI was also actively involved in the Consumer Protection (PEKA) campaign initiated by Bank Indonesia.

In 2023, ASPI was again appointed as the main partner of Bank Indonesia in organizing the 2023 Indonesian Digital Financial Economy Festival (FEKDI) with the theme "*Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth*" which was held on May 7-10, 2023 at the Jakarta Convention Center, Jakarta. ASPI together with other associations played an active role in the implementation of the series of events featuring various speakers and the latest innovations in the payment system.

PERFORMANCE OUTLOOK IN 2024

Facing the opportunities and challenges in 2024, ASPI has developed a 2024 work program that consistently supports the implementation of the Indonesian Payment System Blueprint 2025 and considers various member inputs and strategic initiatives as well as developments in regional and global Payment Systems. ASPI will collaborate intensively with members and related stakeholders in the payment system through various planned activities, including the expansion and development of QRIS features including



lain perluasan dan pengembangan fitur-fitur QRIS termasuk perluasan *QRIS Cross-border* ke berbagai negara, pengembangan elektronifikasi pembayaran, mempersiapkan dan mengembangkan standar *Contactless*, NFC dan tokenisasi, penyusunan dan penerbitan Ketentuan Operasional, serta memulai pendaftaran Penyedia Jasa Audit TI dan Pengujian Keamanan.



Selain itu, di tahun 2024 ASPI juga mempersiapkan pembentukan dan operasionalisasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUA – LB) di akhir November 2023. Pembentukan LSP Sistem Pembayaran Indonesia ini untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi bagi SDM unggul di bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) dan sesuai mandat serta rekomendasi yang diberikan oleh Bank Indonesia sebagai Regulator dan didukung oleh Ikatan Bankir Indonesia (IBI) sebagai Asosiasi Profesi Perbankan.



ASPI juga akan meneruskan pelaksanaan program sosialisasi & edukasi kepada Anggota terkait Ketentuan ASPI dan aturan-aturan terbaru lainnya, serta memperkuat kompetensi, kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia ASPI yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASPI dalam melaksanakan program kerja ASPI.



TATA KELOLA ORGANISASI YANG BAIK

Komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, diwujudkan ASPI melalui berbagai peraturan yang mencerminkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Dalam pelaksanaan dan implementasi komitmen terhadap tata kelola yang baik, ASPI juga terbuka terhadap aspirasi anggota dalam setiap proses penyusunan standarisasi sistem pembayaran. Oleh karena itu, setiap ketentuan ASPI merupakan implementasi dari prinsip-prinsip yang berpegang teguh pada etika, kesetaraan, dan profesionalisme, serta keterbukaan dengan mempertimbangkan berbagai masukan dan kebutuhan dari industri. Begitu juga dalam hal pengelolaan keuangan organisasi, Laporan Keuangan ASPI diaudit oleh Akuntan Publik independen dan disampaikan ke Rapat Umum Anggota Tahunan untuk disetujui dan disahkan.

APRESIASI

Pada kesempatan ini, atas nama Badan Pengurus, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota ASPI karena berkat dukungan dan kontribusi yang diberikan, ASPI dapat menjalankan kinerja dan program di tahun 2023 dengan baik. Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Tim Pelaksanan Operasional ASPI atas komitmen dan dedikasi dalam menjalankan

the expansion of Cross-Border QRIS to various countries, development of payment elektronification, preparation and development of Contactless, NFC and tokenization standards, draft and issuance of Operational Provisions, and the registration of IT Audit and Security Testing Service Providers.

In 2024, ASPI is also preparing for the establishment and operationalization of a Professional Certification Body (LSP) which has received approval at the Extraordinary General Meeting of Members at the end of November 2023. The establishment of the Indonesian Payment System LSP is to fulfill the certification needs for superior human resources in the field of Payment Systems and Rupiah Management (SPPUR) and in accordance with the mandate and recommendations given by Bank Indonesia as the Regulator and supported by the Indonesian Bankers Association (IBI) as the Banking Professional Association.

ASPI will also continue the implementation of familiarization & education programs to Members related to ASPI Provisions and other latest regulations, as well as strengthening the competence, capability and capacity of ASPI's human resources which are expected to improve ASPI's performance in implementing ASPI's work program.

GOOD ORGANIZATIONAL GOVERNANCE

Commitment to the principles of good organizational governance is realized by ASPI through various regulations that reflect the principles of openness and accountability. In the implementation of the commitment to good governance, ASPI is also open to the aspirations of members in every process of payment system standardization drafting. Therefore, every ASPI regulation is an implementation of principles that adhere to ethics, equality, and professionalism, as well as openness by considering various inputs and needs from the industry. Likewise, in terms of the organization's financial management, ASPI's Financial Statements are audited by an independent Public Accountant and submitted to the Annual General Meeting of Members for approval and ratification.

APPRECIATION

On this occasion, on behalf of the Executive Board, I would like to thank all ASPI members for their support and contributions that enabled ASPI to successfully carried out its performance and programs in 2023. Our highest appreciation and appreciation also go to the ASPI Operational Implementation Team for their commitment and dedication in running ASPI's programs and serving the

program ASPI dan melayani kebutuhan segenap anggota ASPI. Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Badan Pengawas ASPI atas arahan, pengawasan, serta nasihat yang diberikan kepada Badan Pengurus sehingga kami mampu membuat dan mengaplikasikan kebijakan strategis di tahun 2023. Kepada Bank Indonesia, kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan penuh yang diberikan sehingga ASPI dapat menjalankan peran secara maksimal sebagai SRO dan mitra strategis Bank Indonesia. Semoga kerjasama dan sinergi yang terjalin selama ini dapat terus kita tingkatkan dalam rangka mewujudkan sistem pembayaran Indonesia yang cepat mudah murah dan andal.

needs of all ASPI members. We express our appreciation and gratitude to the ASPI Supervisory Board for the direction, supervision, and advice given to the Management Board so that we were able to make and apply strategic policies in 2023. To Bank Indonesia, we also express our appreciation and gratitude for the trust and full support so that ASPI can carry out its role optimally as an SRO and strategic partner of Bank Indonesia. It is our hope that we can continue to improve the cooperation and synergy that has been established so far to realize a fast, easy, cheap and reliable payment system in Indonesia.

Jakarta, Juni | June 2024
Atas Nama Badan Pengurus
On behalf of the Management Board

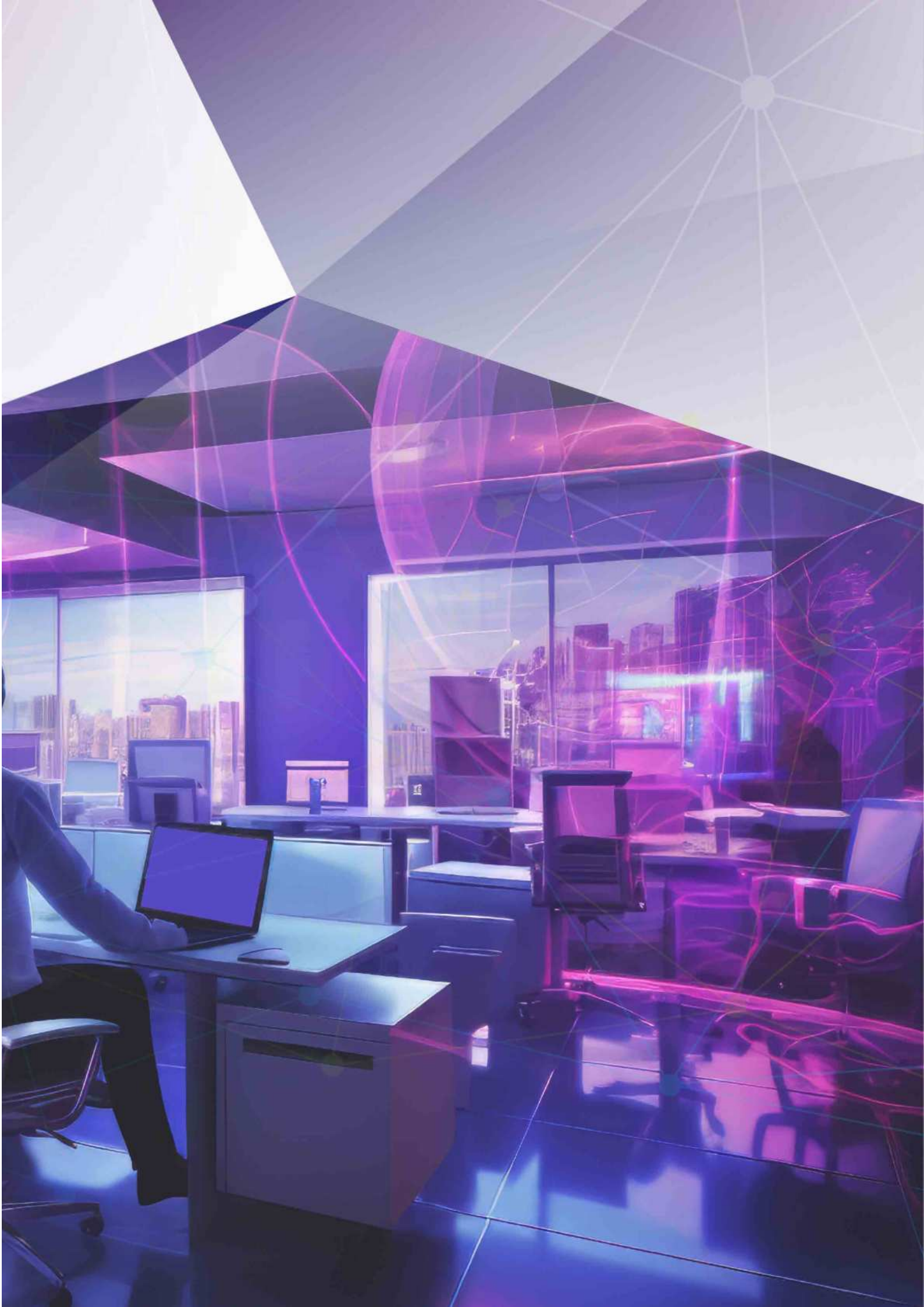
Santoso
Ketua Badan Pengurus
Chairman of Management Board

02

PROFIL ASPI

ASPI PROFILE





SEKILAS ASPI

ASPI AT A GLANCE



ASPI didirikan sebagai salah satu lembaga yang berfungsi untuk mendorong peran pelaku sistem pembayaran di Indonesia mewujudkan industri sistem pembayaran yang lebih efisien, aman, dan andal. Sebagai mitra Bank Indonesia, ASPI mendukung fungsi Bank Indonesia sebagai regulator dalam melaksanakan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.



Perkembangan berbagai layanan jasa sistem pembayaran mendorong munculnya para pelaku baru dalam industri sistem pembayaran di Indonesia. Dimana sebelumnya sebagian besar dilakukan oleh lembaga perbankan, saat ini penyelenggara layanan sistem pembayaran juga dilakukan oleh lembaga selain bank yang mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan layanan kepada nasabah dan pengguna, masing-masing pelaku sistem pembayaran melakukan berbagai inovasi dalam teknologi, produk, dan layanannya.



Seiring dengan perkembangan teknologi dalam industri sistem pembayaran, dibutuhkan ketentuan dan peraturan yang tepat, cepat dan mampu mengakomodir perkembangan terkini dari penyelenggaraan sistem pembayaran dari berbagai sisi baik bisnis maupun teknis. Di satu sisi, Bank Indonesia selaku otoritas di bidang sistem pembayaran memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran secara menyeluruh di Indonesia. Di sisi lain, pihak industri memiliki kompetensi terkait aspek mikro dan teknis penyelenggaraan sistem pembayaran, termasuk teknologi informasi dan infrastruktur.



Untuk mendukung terciptanya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal, industri sistem pembayaran sebagai pihak yang lebih memahami kebutuhan dan kepentingan pasar, perlu berperan aktif. Peran aktif tersebut dapat terwujud melalui suatu wadah organisasi yang merepresentasikan seluruh pelaku sistem pembayaran dan menjadi mitra Bank Indonesia, serta mendukung visi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan perkembangan transaksi sistem pembayaran yang terus meningkat, maka melalui Rapat Umum Anggota (RUA) tanggal 28 Oktober 2011, Bank Indonesia meresmikan pembentukan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) sebagai *Self-Regulatory organization (SRO)*. ASPI mempunyai peran, tugas dan fungsi dalam lingkup mikro dan teknis untuk

ASPI was established as one of the institutions that serves to encourage the role of payment system players in Indonesia to realize a more efficient, safe and reliable payment system industry. As a partner of Bank Indonesia, ASPI supports Bank Indonesia's function as a regulator in carrying out the task of regulating and maintaining a smooth payment system.

The development of various payment system services has encouraged the emergence of new actors in the payment system industry in Indonesia. Where previously most were implemented by banking institutions, currently payment system service providers are also carried out by institutions other than banks that have experienced rapid growth in recent years. To provide added value and improve services to customers and users, each payment system actor makes various innovations in technology, products and services.

Along with the development of technology in the payment system industry, it is necessary to have provisions and regulations that are appropriate, fast and able to accommodate the latest developments in the implementation of the payment system from both the business and technical aspects. On the one hand, Bank Indonesia as the authority in the payment systems has the authority to regulate and maintain the smooth running of the payment system as a whole in Indonesia. On the other hand, the industry has competence related to the micro and technical aspects of organizing payment systems, including information technology and infrastructure.

To support the creation of an efficient, fast, safe and reliable payment system, the payment system industry as a party that better understands the needs and interests of the market needs to play an active role. This active role can be realized through an organizational forum that represents all payment system actors and becomes a partner of Bank Indonesia, and supports Bank Indonesia's vision in carrying out the task of regulating and maintaining a smooth payment system.

Based on this background and the development of payment system transactions that continue to increase, through the General Meeting of Members (GMS) on October 28, 2011, Bank Indonesia formalized the establishment of the Indonesian Payment System Association (ASPI) as a Self-Regulatory Organization (SRO). ASPI has roles, duties and functions in the micro and technical scope to make

membuat ketentuan dalam industri sistem pembayaran yang mampu mewadahi berbagai perubahan dan dinamika yang terjadi dengan tetap memperhatikan peraturan dan kebijakan Bank Indonesia.

Peran, tugas dan fungsi ASPI didasarkan pada kesepakatan, amanat dan mandat dari pelaku sistem pembayaran yang menjadi anggota asosiasi. Dalam menerbitkan ketentuan, ASPI harus memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan menjaga harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan dan kebijakan Bank Indonesia.

Pendirian ASPI telah dituangkan di dalam Akta No. 10 tanggal 20 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Partomuan Pohan, S.H., LLM., Notaris di Jakarta Selatan.

provisions in the payment system industry that are able to accommodate various changes and dynamics that occur while still paying attention to Bank Indonesia regulations and policies.

The roles, duties and functions of ASPI are based on agreements and mandates from payment system players who are members of the association. In issuing provisions, ASPI must pay attention to consumer protection aspects and maintain harmonization and synchronization with Bank Indonesia regulations and policies.

The establishment of ASPI is stipulated in Deed No. 10 dated October 20, 2010 made before Partomuan Pohan, S.H., LLM, Notary in South Jakarta.

VISI VISION

Mewujudkan Sistem Pembayaran Nasional yang lebih efisien, aman, andal, cepat, dan terintegrasi dalam menuju *Less Cash Society*.

Realizing a National Payment System that is more efficient, safe, reliable, fast, and integrated towards a Less Cash Society.

MISI MISSION

- Menjadi *Self Regulatory Organization* yang independen dan terpercaya dalam pengaturan kebijakan teknis untuk membangun sistem pembayaran nasional yang aman dan andal.
- Menjadi mitra strategis Bank Indonesia yang professional.
- Menjadi wadah aspirasi yang terpercaya bagi industri sistem pembayaran nasional.
- Menjadi penyelaras kebijakan ASPI yang mengarah kepada terwujudnya *Less Cash Society*.
- To become an independent and trustworthy Self Regulatory Organization in regulating technical policies to build a safe and reliable national payment system.
- To become a professional strategic partner of Bank Indonesia.
- To become a trusted aspiration platform for the aspiration of the national payment system industry.
- To align ASPI's policies toward the realization of a Less Cash Society.

PERAN DAN KOMITMEN ASPI

ASPI'S ROLE AND COMMITMENT



Sebagai *Self Regulatory Organization* yang merupakan representasi pelaku industri sistem pembayaran sekaligus mitra strategis BI, ASPI berkomitmen untuk mendukung implementasi transformasi digital sesuai visi Bank Indonesia yang tertuang dalam *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 melalui 3 pendekatan dibawah ini:

As a Self Regulatory Organization that represents payment system industry and a strategic partner of Bank Indonesia, ASPI is committed to supporting the implementation of digital transformation in accordance with Bank Indonesia's vision outlined in the Indonesian Payment System Blueprint 2025 through the following 3 three approaches.



ACTION

Terlibat secara proaktif dalam menyusun standar, merumuskan rencana aksi, dan berkolaborasi dalam implementasi rencana aksi untuk mengakselerasi terwujudnya pembayaran digital yang universal dan inklusi.

Proactively involved in setting standards, formulating action plans, and collaborating in the implementation of action plans to accelerate the realization of universal and inclusive digital payments.



ADVOCACY

Merupakan representasi 'suara' industri dan melindungi kepentingan anggota ASPI dalam konteks mewujudkan Visi Sistem Pembayaran Nasional yang berkesinambungan secara efektif sesuai dengan meningkatkan resiliensi dan daya saing industri sistem pembayaran nasional, international leading practices dan tata kelola industri yang baik.

Representing the 'voice' of the industry and protecting the interests of ASPI members in realizing a sustainable National Payment System Vision effectively by enhancing the resilience and competitiveness of the national payment system industry, international leading practices and good industrial governance.



AWARENESS

Bertindak proaktif dalam merancang paket sosialisasi informasi dan kajian potensi dampak/manfaat bagi pelaku industri/anggota ASPI dan memberikan edukasi masyarakat bekerjasama dengan anggota ASPI.

Acting proactively in designing information dissemination and assessing the potential impact/benefit for industry/ASPI members and providing public education in collaboration with ASPI members.

BADAN PENGAWAS ASPI

ASPI SUPERVISORY BOARD



PROFIL BADAN PENGAWAS

SUPERVISORY BOARD PROFILE



Kartika Wirjoatmodjo

Ketua | Chairman

Terpilih sebagai Ketua Badan Pengawas periode 2022-2025. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Menteri di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Elected as Chairman of the Supervisory Board for the 2022-2025 period. He currently serves as Deputy Minister at the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs).



Batara Sianturi

Anggota | Member

Terpilih sebagai Anggota Badan Pengawas periode 2022 – 2025. Saat ini beliau menjabat sebagai CEO Citibank N.A. Indonesia.

Elected as Member of the Supervisory Board for the 2022 – 2025 period. He currently serves as CEO of Citibank N.A. Indonesia.



Hery Gunardi

Anggota | Member

Terpilih sebagai Anggota Badan Pengawas periode 2022-2025. Saat ini beliau menjabat sebagai CEO Bank Syariah Indonesia Tbk sejak Februari 2021.

Elected as a Member of the Supervisory Board for the 2022-2025 period. He currently serves as CEO of Bank Syariah Indonesia Tbk since February 2021.



Sunarso

Anggota | Member

Terpilih sebagai Anggota Badan Pengawas periode 2021 - 2024. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sejak tahun 2019.

Elected as a Member of the Supervisory Board for the 2021 – 2024 period. He currently serves as President Director of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk since 2019.



Rosmaya

Badan Pengawas Independen

Independent Supervisory Board

Diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas Independen periode 2022-2025. Sebelumnya menjabat sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia periode 2017 2022.

Appointed as an Independent Supervisory Board Member for the 2022-2025 period. She previously served as Deputy Governor of Bank Indonesia for the 2017-2022 period.

BADAN PENGURUS ASPI

ASPI MANAGEMENT BOARD





PROFIL BADAN PENGURUS

MANAGEMENT BOARD PROFILE



Santoso

Ketua Umum | Chairman

Terpilih sebagai Ketua Umum periode 2021 – 2024. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur PT Bank Central Asia Tbk.

Elected as Chairman for the 2021-2024 period. He currently serves as Director of PT Bank Central Asia Tbk.



Corina Leyla Karnalies

Wakil Ketua Umum | Deputy Chairman

Diangkat sebagai Wakil Ketua untuk periode 2023 – 2026. Beliau menjabat sebagai Direktur *Digital & Integrated Transaction Banking* di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sejak Maret 2023. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur *Consumer Banking* di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Appointed as Deputy Chairman for the 2023 – 2026 period. She serves as Director of Digital & Integrated Transaction Banking at PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk since March 2023. Previously, she served as Director of Consumer Banking at PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.



Handayani

Sekretaris Jenderal | Secretary General

Diangkat sebagai Sekretaris Jenderal periode 2021 – 2024. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Appointed as Secretary General for the 2021 – 2024 period. She currently serves as Consumer Director of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



Riko Agus Surya Abdurrahman

Wakil Sekretaris Jenderal | Deputy Secretary General

Diangkat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal periode 2022 – 2025. Saat ini beliau adalah Direktur PT Visa Worldwide Indonesia sejak tahun 2018.

Appointed as Deputy Secretary General for the 2022 – 2025 period. He is currently the Director of PT Visa Worldwide Indonesia since 2018.



Henry Iswaratioso (Vincent)

Bendahara | Treasurer

Diangkat sebagai Bendahara periode 2021 - 2024. Saat ini menjabat sebagai CEO PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) dan *Chairman* PoinStar Pte Ltd sejak April 2017.

Appointed as Treasurer for the 2021 - 2024 period. He currently serves as CEO of PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) and Chairman of PoinStar Pte Ltd since April 2017.



Eddy Hadiyanto

Wakil Bendahara | Deputy Treasurer

Diangkat sebagai Wakil Bendahara periode 2022-2025. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia (APPUI) dan Direktur PT Eka Bakti Amerta Yoga Sejahtera (Penyelenggara Transfer Dana bukan Bank).

Appointed as Deputy Treasurer for the 2022-2025 period. Currently, he also serves as Chairman of the Association of Indonesian Money Transfer Organizers (APPUI) and Director of PT Eka Bakti Amerta Yoga Sejahtera (Non-Bank Fund Transfer Institution).



Timothy Utama

Ketua Komite 1 (Open Banking)

Head of Committee 1 (Open Banking)

Diangkat sebagai Ketua Komite 1 periode 2022 - 2025. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur *Information Technology* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sejak 15 Maret 2021.

Appointed as Head of Committee 1 for the 2022 - 2025 period. He currently serves as Director of Information Technology of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk since March 15, 2021.



Abraham Josef Adriaansz

Ketua Komite 2 (Sistem Pembayaran Ritel)

Head of Committee 2 (Retail Payment System)

Diangkat menjadi Ketua Komite 2 periode 2022 - 2025. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur *Corporate Strategy & Development* PT Rintis Sejahtera.

Appointed as Head of Committee 2 for the 2022 - 2025 period. He currently serves as Director of Corporate Strategy & Development of PT Rintis Sejahtera.



Ari Yanuanto Asah

Ketua Komite 3 (Infrastruktur & Sistem Pembayaran)

Head of Committee 3 (Infrastructure & Payment System)

Diangkat sebagai Ketua Komite 3 periode 2022 - 2025. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur *Operation & IT* PT Allo Bank Tbk sejak tahun 2021.

Appointed as Head of Committee 3 for the 2022 – 2025 period. He currently serves as Director of Operations & IT of PT Allo Bank Tbk since 2021.



Soejanto Soetjijo

Ketua Komite 4 (Data dan Keamanan)

Head of Committee 4 (Data and Security)

Diangkat sebagai Ketua Komite 4 periode 2022-2025. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur di PT Bank Sinarmas.

Appointed as Head of Committee 4 for the 2022-2025 period. He currently serves as Director at PT Bank Sinarmas.



Ardhi Wibowo

Ketua Komite 5 (Regulasi dan Kebijakan)

Head of Committee 5 (Regulation and Policy)

Menjabat sebagai Ketua Komite 5 bidang Regulasi dan Kebijakan periode 2023-2026. Saat ini menjabat sebagai Direktur Kepatuhan PT Bank UOB Indonesia.

Served as Head of Committee 5 on Regulation and Policy for the 2023-2026 period. He currently serves as Compliance Director of PT Bank UOB Indonesia.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank
ASOSIASI

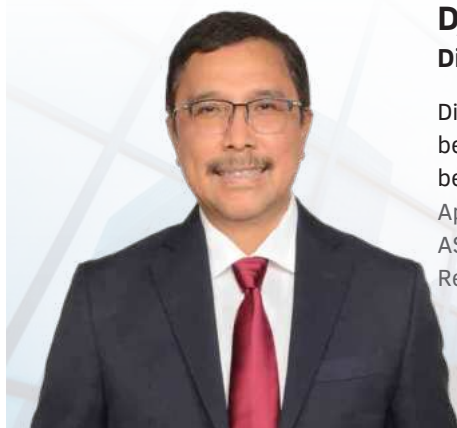
DIREKTUR EKSEKUTIF

EXECUTIVE DIRECTORS



PROFIL DIREKTUR EKSEKUTIF

EXECUTIVE DIRECTORS PROFILE



Djamin Edison Nainggolan

Direktur Eksekutif | Executive Director

Diangkat sebagai Direktur Eksekutif dengan tanggung jawab mengkoordinasikan berbagai kegiatan ASPI dan bertanggung jawab menangani kegiatan yang berhubungan dengan Open API dan Sistem Pembayaran Ritel.

Appointed as Executive Director with the responsibility of coordinating various ASPI activities and responsible for handling activities related to Open API and Retail Payment System.



Susiana Suhendra

Direktur Eksekutif | Executive Director

Diangkat sebagai Direktur Eksekutif dengan tanggung jawab menangani kegiatan operasional dan kegiatan yang berhubungan dengan infrastruktur sistem pembayaran.

Appointed as Executive Director with responsibility for managing operational activities and activities related to payment system infrastructure.



Yanti Pusparini

Direktur Eksekutif | Executive Director

Diangkat sebagai Direktur Eksekutif untuk menangani data dan keamanan, regulasi dan kebijakan, serta *member engagement*.

Appointed as Executive Director to manage data and security, regulation and policy, and member engagement.

TIM PELAKSANA

IMPLEMENTATION TEAM



KEANGGOTAAN

MEMBERSHIP

Dari tahun ke tahun, jumlah keanggotaan ASPI terus mengalami pertambahan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya institusi yang ingin berkontribusi pada perkembangan perekonomian Indonesia melalui perwujudan industri sistem pembayaran yang lebih efisien.

Sampai dengan bulan Desember 2023, ASPI memiliki 224 anggota yang terdiri dari 122 Anggota Biasa dan 102 Anggota Afiliasi, dimana dari 224 anggota tersebut, 120 anggota merupakan bank (terdiri dari Bank Umum, Bank Syariah, BPD, dan BPR) dan 104 lembaga selain bank, yang meliputi perusahaan *fintech*, perusahaan telekomunikasi, *switching*, prinsipal, dan institusi lainnya. ASPI mengapresiasi anggota untuk dapat berpartisipasi bersama dengan ASPI dalam mengembangkan sistem pembayaran nasional yang lebih efisien, aman, dan andal serta memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Year after year, the number of ASPI members continues to grow. This shows that more and more institutions want to contribute to the development of the Indonesian economy through the realization of a more efficient payment system industry.

As of December 2023, ASPI had 224 members consisting of 122 Regular Members and 102 Affiliate Members, of which 120 members were banks (consisting of Commercial Banks, Sharia Banks, BPD, and BPR) and 104 non-bank institutions, which included fintech companies, telecommunication companies, switching, principals, and other institutions. ASPI appreciates its members to participate together with ASPI in developing a national payment system that is safer, more efficient, and more reliable and beneficial to all stakeholders.

PERTUMBUHAN KEANGGOTAAN

MEMBERSHIP GROWTH



03

LAPORAN KINERJA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

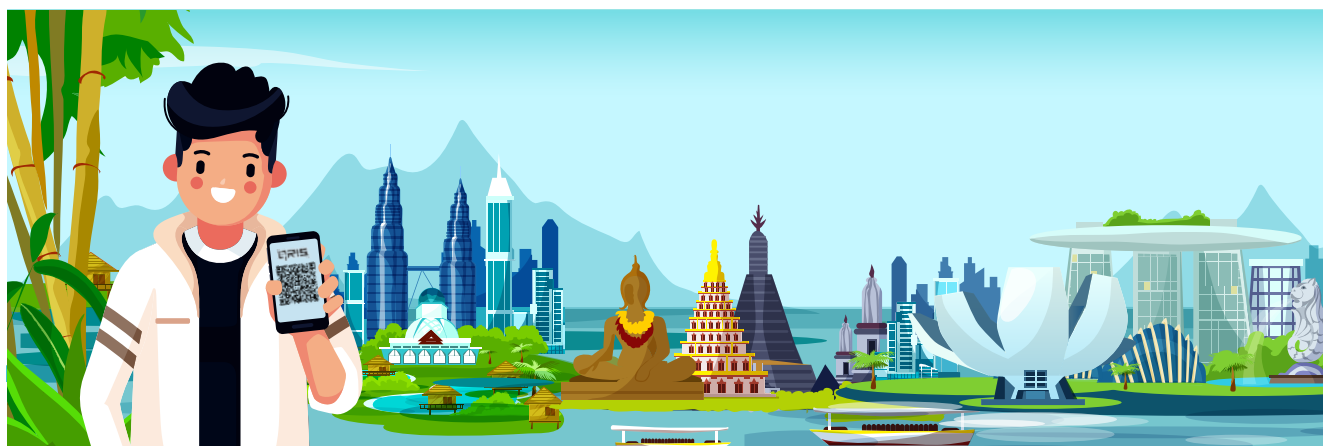
PERFORMANCE REPORT AND
WORK PROGRAM
IMPLEMENTATION





PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN QRIS

QRIS DEVELOPMENT AND EXPANSION



Pada tahun 2020, total volume transaksi QRIS yaitu 124,11 juta transaksi dengan total nominal transaksi QRIS mencapai Rp 8,21 triliun. Kemudian di sepanjang tahun 2021, *volume* transaksi QRIS terus menunjukkan *trend* kenaikan yang sangat signifikan sehingga secara total, *volume* transaksi QRIS mencatat pertumbuhan sebesar 201,90% dibanding dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan signifikan terhadap *volume* transaksi QRIS terus berlanjut pada tahun 2023 sebagai akibat dari pergeseran kebiasaan masyarakat menjadikan QRIS sebagai pilihan pembayaran dalam keseharian mereka, sehingga pada tahun 2023 terdapat total 2,14 miliar transaksi.

- Perluasan penggunaan QRIS antarnegara (*Cross-border*) merupakan bagian dari inisiatif untuk menghubungkan pembayaran lintas negara melalui interkoneksi QR Code pembayaran nasional yang merupakan salah satu wujud implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025.

Melanjutkan peluncuran QRIS antarnegara dengan Thailand di tahun 2022, pada 8 Mei 2023 telah diluncurkan QRIS antarnegara dengan Malaysia, sedangkan dengan Singapura diluncurkan pada *event Singapore Fintech Festival* (SFF) tanggal 17 November 2023 di Singapura.

Indonesia telah bekerja sama dalam hal layanan 13 Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan 4 perusahaan *switching* telah berpartisipasi dalam program QRIS antarnegara dengan kedua negara tersebut.

- Pengembangan QRIS TUNTAS (Tarik Tunai, Transfer & Setor) dengan *soft launch* yang telah dilaksanakan pada bulan November 2022 dalam acara *Executive Gathering* ASPI di Bali dilanjutkan ke tahap implementasi pada bulan Agustus 2023 (*launching* pada tanggal 17 Agustus 2023).

In 2020, the total volume of QRIS transactions amounted to 124.11 million transactions with a total nominal value of Rp8.21 trillion. Throughout 2021, the QRIS transaction volume continued to show a very significant upward trend and recorded a growth of 201.90% compared to the previous year. Significant growth in the QRIS transaction volume continued in 2023 as a result of the shift in people's habits to make QRIS a payment option in their daily lives, culminating in a total of 2.14 billion transactions in 2023.

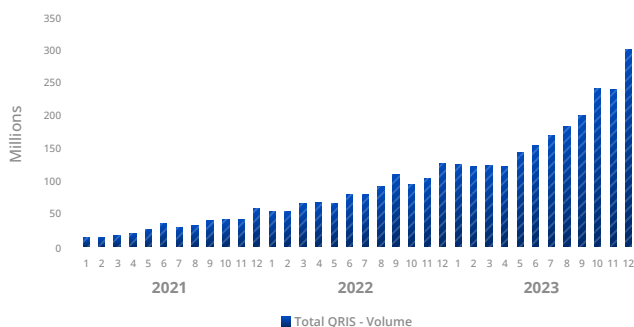
- The expansion of QRIS between countries (*cross-border*) is part of the initiative to connect cross-border payments through the interconnection of national payment QR Codes which is one of the manifestations of the implementation of the Indonesian Payment System Blueprint 2025.

Following the launch of Cross-Border QRIS with Thailand in 2022, Cross-Border QRIS with Malaysia was launched on May 8, 2023, while the Cross-Border QRIS with Singapore was launched at the Singapore Fintech Festival (SFF) event on November 17, 2023 in Singapore.

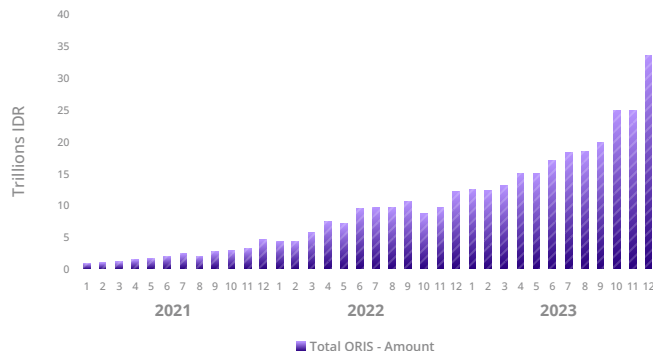
13 Payment Service Providers and four switching companies have participated in the cross border QRIS program with both countries.

- The development of QRIS TUNTAS (Cash Withdrawal, Transfer & Deposit) had a soft launch in November 2022 at the ASPI Executive Gathering event in Bali proceeded to the implementation stage in August 2023 (officially launching on August 17, 2023).

TOTAL QRIS Trx - VOLUME



TOTAL QRIS Trx - NOMINAL



KARTU KREDIT INDONESIA (KKI) FISIK

PHYSICAL INDONESIAN CREDIT CARDS (KKI)



Bersama dengan *working group* yang dibentuk, ASPI memberikan dukungan penuh dalam penerbitan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Fisik melalui penyusunan spesifikasi teknis, penyusunan ketentuan operasional, pembuatan design kartu KKI, serta penetapan skema harga.

KKI Fisik secara resmi diluncurkan pada tanggal 8 Mei 2023 pada pelaksanaan acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 dengan 10 Bank Pemerintah dan Bank Daerah bertindak sebagai penerbit. KKI yang diterbitkan ini merupakan instrumen pembayaran berbasis kredit dengan pemrosesan secara domestik untuk memfasilitasi belanja barang dan jasa Pemerintah Pusat dan Daerah. KKI sebagai produk dalam negeri sejalan dengan program pemerintah yakni Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI). Kehadiran KKI ini bermanfaat untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai, memperkuat keamanan bertransaksi, mengurangi potensi *fraud* dari transaksi secara tunai, serta mengurangi *cost of idle cash* dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya bagi perekonomian nasional.



Together with the established working group, ASPI provides full support in the issuance of the Physical Indonesian Credit Cards (KKI) through the development of technical specifications, operational provisions, KKI card designs, as well as determination of pricing schemes.

Physical KKI was officially launched on May 8, 2023 at the 2023 Indonesian Digital Financial Economy Festival (FEKDI), with 10 state banks and regional banks as issuers. The issued KKI is a credit-based payment instrument with domestic processing to facilitate spending on goods and services of the Central and Regional Governments. KKI as a domestic product is in line with the government program, namely the Proud of Indonesian Products Movement (GBBI). KKI is beneficial for minimizing the use of cash, strengthening transaction security, reducing the potential for fraud from cash transactions, and reducing the cost of idle cash to increase cost efficiency for the national economy. KKI is a form of national independence and certainty of the sovereignty of Government transaction data.

KKI ONLINE PAYMENT

KKI ONLINE PAYMENT



Sebagai tahapan lanjutan dari KKI Kartu Fisik Segment Pemerintah, dilakukan pengembangan KKI *Online*:

- Online Payment* menggunakan teknologi *QR Code* menggunakan QRIS dengan sumber dana dari KKI, telah di implementasikan di bulan Oktober 2023; dan
- Online Payment* tokenisasi dengan sumber dana dari KKI, UAT/PTR telah dilakukan di bulan Desember 2023.



As a further step from KKI physical government segment credit card, the development of online KKI is being undertaken:

- Online payment using QR Code technology (QRIS) with funds from KKI were implemented in October 2023; and
- UAT/PTR Online Payment tokenization using funds from KKI were conducted in December 2023.

PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN ASPI (SiLA)

DEVELOPMENT OF ASPI SERVICE SYSTEM (SiLA)



Untuk meningkatkan efisiensi layanan yang diberikan ASPI, telah dibangun sistem otomasi layanan berbasis *web* yang merupakan *platform* untuk pemrosesan:

- Permohonan Surat Rekomendasi SNAP.
- Permohonan Surat Rekomendasi QRIS.
- Permohonan Surat Sertifikasi (*National Standar Indonesian Chip Card Specification*).
- Permohonan Spesifikasi QRIS.
- Permohonan Skenario Pengujian QRIS.
- Permintaan IPKC (*Issuer Public Key Certificate*).

Tata cara penggunaan dan fitur-fitur SiLA telah disosialisasikan kepada anggota ASPI pada tanggal 21 November 2023 dan mulai diterapkan pada 1 Desember 2023.

To enhance the efficiency of services provided by ASPI, a web-based automation system has been developed as a platform for processing:

- Request for SNAP Recommendation Letter.
- Request for QRIS Recommendation Letter.
- Request for NSICCS (*National Standar Indonesian Chip Card Specification*) Certification Letter.
- Request for QRIS Specification.
- Request for QRIS Test Scenario.
- Request for IPKC (*Issuer Public Key Certificate*).

The procedures and features of SiLA were disseminated to ASPI members on November 21, 2023 and implementation commenced on December 1, 2023.

PENGALIHAN PENGELOLAAN DEVELOPER SITE SNAP DARI BANK INDONESIA KE ASPI

MIGRATION OF SNAP DEVELOPER SITE MANAGEMENT FROM BANK INDONESIA TO ASPI

Melalui PADG nomor 23/15/PADG/2021 tentang implementasi Standar Nasional *Open Application Programming Interface* Pembayaran, Bank Indonesia telah meluncurkan Standar Nasional Open API Pembayaran

Through PADG number 23/15/PADG/2021 concerning the implementation of the National Standard for Open Application Programming Interface for Payments, Bank Indonesia launched the National Standard for Payment

(SNAP) pada tanggal 17 Agustus 2021 yang mana pengelolaannya sejak diluncurkan dilakukan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan pada pasal 7 dari PADG tersebut, Bank Indonesia menugaskan SRO dalam hal ini ASPI untuk melakukan pengelolaan SNAP. Oleh karena itu, mulai tanggal 1 September 2023, pengelolaan SNAP telah dialihkan kepada ASPI yang mencakup:

- a) Pengelolaan sistem *Developer Site* SNAP;
- b) Pengelolaan operasional *Developer Site* SNAP;
- c) Pelaksanaan verifikasi dan/ atau pemberian rekomendasi terkait penerapan SNAP;
- d) Pelaksanaan evaluasi dan/ atau pengkinian SNAP secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu; dan
- e) Publikasi SNAP.

Open API (SNAP) on August 17, 2021, which has been managed by Bank Indonesia since its launch.

Based on article 7 of the PADG, Bank Indonesia assigns the SRO, in this case ASPI, to undertake the management of SNAP. Therefore, starting September 1, 2023, the management of SNAP has been transferred to ASPI which includes:

- a) Managing SNAP Developer Site system;
- b) Managing the Operational aspects of SNAP Developer Site;
- c) Implementing verification and/or providing recommendations related to the implementation of SNAP;
- d) Conducting periodic and/or ad-hoc evaluations and updates of SNAP; and
- e) SNAP publication.

PENYUSUNAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PENYEDIA JASA AUDIT TI DAN PENGUJIAN KEAMANAN

DEVELOPMENT OF REGISTRATION REQUIREMENTS FOR IT AUDIT AND SECURITY TESTING SERVICE PROVIDERS



Untuk melaksanakan penugasan Bank Indonesia terkait pendaftaran Penyedia Jasa Audit dan Pengujian Keamanan, ASPI telah membentuk *working group audit* TI, untuk menyusun ketentuan mengenai persyaratan pendaftaran Penyedia Jasa Audit TI dan Pengujian Keamanan serta menyusun ketentuan terkait metodologi *audit* TI dan pengujian keamanan.

To carry out Bank Indonesia's assignment related to the registration IT audit and security testing service providers, ASPI has formed an IT Audit working group. This group is tasked with drafting regulations on the requirements for registering IT Audit and Security Testing Service Providers, as well as developing provisions related to IT audit methodologies and security testing.

KETENTUAN ASPI (KASPI)

ASPI PROVISIONS (KASPI)



Di tahun 2023, ASPI telah menerbitkan Ketentuan ASPI dibawah ini:

- a) KASPI Pengalihan Tanggung Jawab (*Liability Shift*) kartu ATM dan/atau Kartu Debit (KASPI nomor ASPI/K-II/7/VII/2023)

KASPI ini diterbitkan untuk memberikan pengaturan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul bilamana terjadi transaksi tindak kejahatan dan/ atau penyalahgunaan kartu ATM dan/ atau Kartu Debit palsu akibat belum diterapkannya teknologi *chip*.

- b) KASPI Penggunaan KKI Fisik Segmen Pemerintah (KASPI nomor ASPI/K-II/8/VIII/2023)

KASPI ini diterbitkan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan KKI Fisik Segmen Pemerintah dan mengatur tanggung jawab para pihak atas risiko yang timbul dalam hal terjadi tindak kejahatan dan/ atau penyalahgunaan KKI Fisik Segmen Pemerintah.

In 2023, ASPI published the following ASPI Provisions:

- a) KASPI Liability Shift for ATM Cards and/or Debit Cards (KASPI number ASPI/K-II/7/VII/2023)

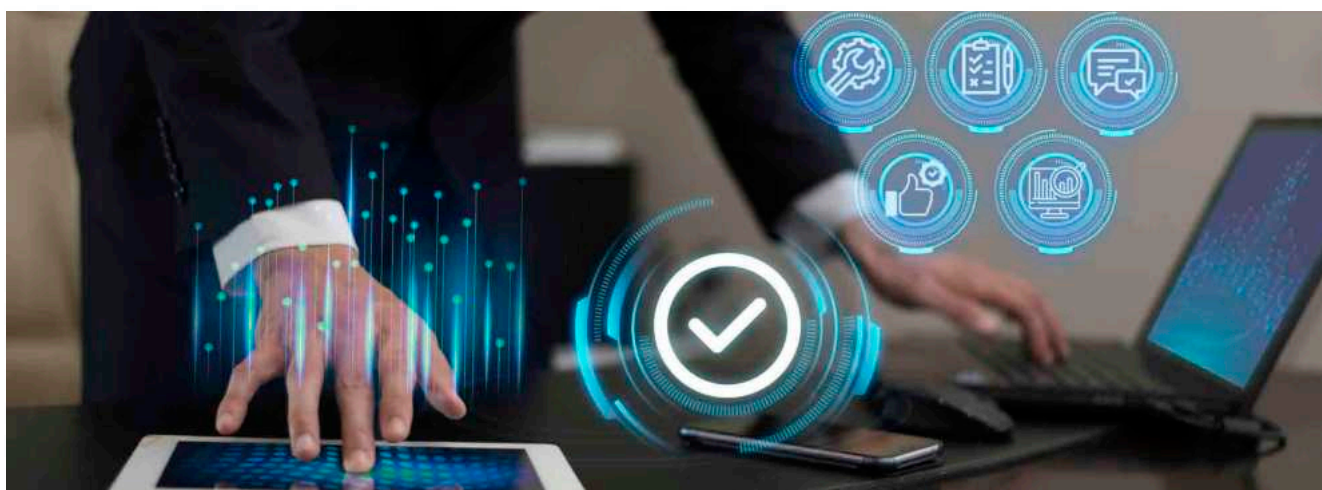
This KASPI was issued to provide regulations in determining the party responsible for losses that may arise in the event of a criminal transaction and/or misuse of counterfeit ATM cards and/or Debit Cards due to the non-implementation of chip technology.

- b) KASPI Use of Physical KKI for Government Segment (KASPI number ASPI/K-II/8/VIII/2023)

This KASPI was issued with the aim of supporting the implementation of the Physical KKI for Government Segment and regulating the responsibilities of the parties for the risks arising in the event of criminal activities and/or misuse of Physical KKI for Government Segment.

FUNGSI PENGELOLAAN SERTIFIKASI & REKOMENDASI

MANAGEMENT FUNCTIONS OF CERTIFICATION AND RECOMMENDATIONS



a. Sertifikasi NSICCS

Sertifikat yang dikeluarkan ASPI selama tahun 2023, adalah:

- Sertifikasi Kartu: 11 produk kartu NSICCS.
- Sertifikasi EDC: 13 produk EDC.
- Sertifikasi ATM: 3 produk ATM.
- Sertifikasi CPT (*Card Perso Test*) : 94.
- Pembuatan IPKC : 221.

a. NSICCS Certification

Certificates issued by ASPI during 2023 are as follows:

- Card Certification: 11 NSICCS card products.
- EDC Certification: 13 EDC products.
- ATM certification: 3 ATM products.
- CPT (*Card Perso Test*) Certification: 94.
- IPKC creation: 221.

b. Pendaftaran Vendor NSICCS

- i. Vendor Terminal : 5
- ii. Vendor Kartu: 1

c. Penerbitan Surat Rekomendasi QRIS

- i. QRIS MPM : 26
- ii. QRIS CPM : 4
- iii. QRIS Tuntas : 15
- iv. QRIS KKI : 4
- v. QRIS Antarnegara:
 - Thailand : 3
 - Malaysia : 17
 - Singapura : 15

d. Surat Rekomendasi SNAP

Surat Rekomendasi SNAP : 51

e. Surat Rekomendasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR)

Di tahun 2023, ASPI telah mengeluarkan 1 surat rekomendasi LPK SPPUR untuk kegiatan pada sub-bidang dibawah ini:

- i. Pengelolaan Transfer Dana Bagi Bank.
- ii. Pengelolaan Uang Tunai oleh Bank.
- iii. Penukaran Valas dan Pembawaan Uang kertas Asing.
- iv. Setelmen Transaksi Tresuri.
- v. Setelmen Pembayaran Transaksi *Trade Finance*.

b. NSICCS Vendor Registration

- i. Terminal Vendors: 5
- ii. Card Vendors: 1

c. Issuance of QRIS Recommendation Letters

- i. QRIS MPM : 26
- ii. QRIS CPM : 4
- iii. QRIS Tuntas : 15
- iv. QRIS KKI : 4
- v. Cross-Border QRIS:
 - Thailand : 3
 - Malaysia : 17
 - Singapore : 15

d. SNAP Recommendation Letters

Snap Recommendation Letters: 51

e. Recommendation Letters for Job Training Institutions (LPK) for Rupiah Payment and Money Management System (SPPUR)

In 2023, ASPI issued 1 LPK SPPUR recommendation letter for activities in the sub-fields below:

- i. Funds Transfer Management for Banks.
- ii. Cash Management by Banks.
- iii. Foreign Exchange and Carrying of Foreign Banknotes.
- iv. Treasury Transaction Settlement.
- v. Trade Finance Transaction Payment Settlement.

RAPAT UMUM ANGGOTA ASPI

ASPI GENERAL MEETING OF MEMBERS

Di tahun 2023, ASPI menyelenggarakan dua Rapat Umum, yaitu:

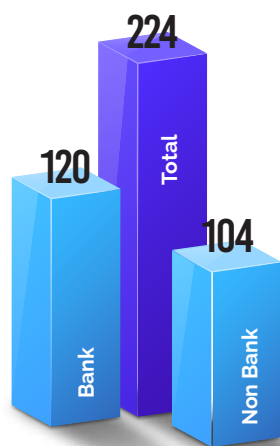
- a. Rapat Umum Anggota (RUA) ASPI diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2023 yang pada perhitungan kuorum kehadiran dihadiri oleh 148 anggota (68% dari 217 anggota ASPI). Pada rapat ini disampaikan pertanggungjawaban kegiatan tahunan dan keuangan ASPI; dan
- b. Rapat Umum Luar Biasa (RUA-LB) ASPI tahun 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 24 November 2023 dengan agenda tunggal mengenai persetujuan pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR). Rapat ini dihadiri oleh 142 anggota ASPI.

In 2023, ASPI held two General Meetings:

- a. ASPI General Meeting of Members (AGM) was held on June 23, 2023, with quorum attendance of 148 members (68%) of 217 ASPI members. During this meeting, annual activities and financial accountabilities of ASPI were presented.
- b. ASPI Extraordinary General Meeting (EGM) was held on November 24, 2023. With a single agenda regarding the approval of establishing a Professional Certification Institution in Payment System and Rupiah management (SPPUR). This meeting was attended by 142 ASPI members

PERKEMBANGAN KEANGGOTAAN

MEMBERSHIP DEVELOPMENT



Pada tahun 2023, terdapat penambahan 18 anggota baru di ASPI. Mayoritas dari anggota baru tersebut adalah Perusahaan *Fintech* dan Perusahaan pengiriman uang/ remitansi. Selain itu juga terdapat beberapa BPR dan bank digital yang menjadi anggota baru. Di tahun yang sama juga terjadi beberapa peristiwa restrukturisasi di sektor perbankan, dimana beberapa BPR yang *merger* dan 1 (satu) bank asing berhenti beroperasi di Indonesia.

Total anggota ASPI per akhir Desember 2023 adalah 224 anggota, terdiri dari 120 bank (termasuk bank umum, bank syariah, BPD, dan BPR) dan 104 lembaga selain bank (seperti Perusahaan *Fintech*, Perusahaan Pengiriman Uang/ Remitansi, Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, dan lainnya).

In 2023, there were an additional 18 new ASPI members. The majority of the new members are fintech companies and remittance companies. In addition, there were also several rural banks (BPRs) and digital banks that became new members. In the same year, there were also several restructuring events in the banking sector, in which several BPRs merged and 1 (one) foreign bank ceased operations in Indonesia.

The total number of ASPI members as of the end of December 2023 was 224 members, consisting of 120 banks (including commercial banks, Islamic banks, BPDs, and BPRs) and 104 non-banks (such as Fintech Companies, Remittance Companies, Principals, Switching Providers, and others).

MEMBER ENGAGEMENT AND COMMUNICATION PROGRAM

MEMBER ENGAGEMENT AND COMMUNICATION PROGRAM

A) PELAKSANAAN STRATEGI KOMUNIKASI QRIS

Bank Indonesia, bersama dengan ASPI dan industri sistem pembayaran menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan strategi komunikasi QRIS yang dimulai pada bulan Juni 2023. Salah satu program dalam kegiatan tersebut adalah program edukasi manfaat QRIS bagi Masyarakat melalui video edukasi dan materi edukasi lainnya dengan tema "QRIS-nya Satu, Menangnya Banyak" dimana edukasi dan publikasi dilaksanakan secara serempak oleh seluruh Anggota ASPI. Tujuan dari program ini adalah mendorong perilaku masyarakat untuk terus menggunakan QRIS dan meningkatkan keamanan dalam bertransaksi menggunakan QRIS.

Selain itu, terdapat juga program komunikasi evaluasi MDR (*Merchant Discount Rate*) QRIS kepada *merchant* usaha mikro, dengan tujuan agar pengenaan MDR QRIS tidak berdampak negatif pada perluasan akseptasi QRIS. Dengan demikian, strategi komunikasi ini difokuskan untuk memberi pemahaman kepada *merchant* mikro terkait evaluasi kebijakan MDR bagi Usaha Mikro sekaligus memelihara *behavior merchant* mikro dalam menggunakan QRIS. Kedua kegiatan komunikasi tersebut terlaksana secara masif melalui berbagai media sosial dan *asset* publikasi lainnya milik PJP, serta kegiatan *offline* lainnya seperti *gathering* ataupun kunjungan langsung.

A) IMPLEMENTATION OF QRIS COMMUNICATION STRATEGY

Bank Indonesia, together with ASPI and the payment system industry, organized activities to implement the QRIS communication strategy starting in June 2023. One of the programs in this activity was the QRIS benefits education program for the Community through educational videos and other educational materials with the theme "One QRIS, Many Wins" where education and publication were carried out simultaneously by all ASPI Members. The program aimed to encourage public behavior to continue using QRIS and increase security in transactions using QRIS.

In addition, there was also a QRIS MDR (*Merchant Discount Rate*) evaluation communication program to micro business merchants, with the aim that the imposition of QRIS MDR did not have a negative impact on the expansion of QRIS acceptance. Thus, this communication strategy focused on providing understanding to micro merchants regarding the evaluation of the MDR policy for Micro Businesses while maintaining the behavior of micro merchants in using QRIS. Both communication activities were expected to be carried out massively through various social media and other publication assets owned by PJP, as well as other offline activities such as gatherings or direct visits.

B) PARTISIPASI DALAM ACARA FESTIVAL EKONOMI KEUANGAN DIGITAL INDONESIA (FEKDI) 2023

ASPI bersama dengan PERBANAS, AFTECH, dan KADIN, kembali ditunjuk sebagai mitra utama Bank Indonesia dalam penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2023 (FEKDI) yang mengusung tema “*Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth*” yang diselenggarakan pada 7-10 Mei 2023 di Jakarta Convention Centre, Jakarta.

ASPI bersama PERBANAS, AFTECH, dan KADIN berperan aktif dalam pelaksanaan rangkaian acara tersebut, termasuk menggelar *showcase booth* dan *ministage* untuk sesi *talk show*, serta menghadirkan pembicara-pembicara yang merupakan Badan Pengurus ASPI maupun dari Anggota ASPI.

FEKDI 2023 merupakan bagian dari rangkaian acara keketuaan ASEAN Indonesia 2023 pada jalur keuangan dan menjadi ajang dalam menunjukkan inovasi produk dan layanan serta sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan *digital* yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Kementerian Perekonomian, Asosiasi dan industri, serta 4 Bank sentral negara ASEAN.

Dalam kesempatan ini, dilaksanakan juga peluncuran Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan QRIS antarnegara Indonesia – Malaysia, yang diharapkan dapat mendorong pembayaran lintas negara yang lebih cepat dan lebih mudah, serta mendukung pertumbuhan UMKM.

C) SOSIALISASI KETENTUAN ASPI (KASPI)

Pada 11 Agustus 2023, ASPI menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk anggota ASPI mengenai KASPI di Hotel Westin Jakarta. Kegiatan ini terdiri dari dua sesi, dimana pada sesi pertama merupakan sosialisasi KASPI Tentang Pengalihan Tanggung Jawab (*Liability Shift*) Kartu ATM dan/ atau Kartu Debit, sedangkan sesi kedua adalah edukasi KASPI tentang Penyusunan Materi Edukasi untuk *Merchant* dan Pengguna QRIS.

Setiap sesi dihadiri oleh Pejabat Bank Indonesia sebagai narasumber bersama ASPI, oleh pejabat Bank Indonesia terkait, dan dihadiri oleh lebih dari 100 anggota ASPI yang berasal dari sektor perbankan, Perusahaan *Fintech*, Lembaga *Switching*, dan Lembaga *Services*.

Selain melakukan sosialisasi untuk ketentuan dan pedoman yang baru diterbitkan, ASPI juga aktif berpartisipasi dalam acara Bank Indonesia untuk mensosialisasikan kembali Peraturan Bank Indonesia dan Ketentuan ASPI yang telah diterbitkan antara lain KASPI SKN BI dan Warkat Debit.

D) MENERBITKAN NEWSLETTER SECARA BERKALA

Berita Triwulanan ASPI diterbitkan untuk memberikan *update* ke anggota ASPI sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan, perkembangan yang terjadi di sistem pembayaran, statistik sistem pembayaran, serta informasi lainnya yang terkait dengan aktivitas ASPI.

B) PARTICIPATION IN 2023 INDONESIAN DIGITAL FINANCIAL ECONOMY FESTIVAL (FEKDI)

Together with PERBANAS, AFTECH, and KADIN, ASPI was again appointed as the main partner of Bank Indonesia in organizing the 2023 Indonesian Digital Financial Economy Festival (FEKDI) with the theme “*Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth*” held on May 7-10, 2023 at the Jakarta Convention Center, Jakarta.

ASPI, along with PERBANAS, AFTECH, and KADIN played an active role in the event series, including organizing showcase booths and mini stages for talk show sessions, as well as featuring speakers from the ASPI Management Board and ASPI Members.

2023 FEKDI was part of a series of Indonesia’s 2023 ASEAN chairmanship events on the financial sector and was a showcase for product and service innovation as well as digital economic and financial policy synergies organized by Bank Indonesia, the Ministry of Economic Affairs, industry associations, and 4 ASEAN central banks.

On this occasion, the Indonesian Credit Cards (KKI) and Cross-border QRIS of Indonesia-Malaysia were also launched, which was expected to promote faster and easier Cross-border payments, and support the growth of MSMEs.

C) DISSEMINATION OF ASPI PROVISIONS (KASPI)

On August 11, 2023, ASPI held dissemination and education for ASPI members regarding KASPI at the Westin Jakarta hotel. The activity consisted of 2 (two) sessions, in which the first session covered the familiarization of KASPI on Liability Shift for ATM Cards and/or Debit Cards, while the second session focused on KASPI education on the Preparation of Educational Materials for Merchants and QRIS Users.

Each session at the KASPI dissemination was supported by the relevant Bank Indonesia officials, and attended by more than 100 ASPI members from the banking sector, Fintech Companies, Switching Companies, and Services Institutions.

In addition to conducting dissemination for newly issued provisions and guidelines, ASPI also actively participated in Bank Indonesia events to re-disseminating Bank Indonesia Regulations and ASPI Provisions that have been issued, including KASPI SKN BI and Debit Instruments.

D) REGULAR NEWSLETTER PUBLICATION

ASPI Quarterly News is published to provide updates to ASPI members regarding the implementation of activities, developments in the payment system, payment system statistics, and other information related to ASPI activities.

04

RENCANA KEGIATAN ASPI

ASPI ACTIVITY PLAN







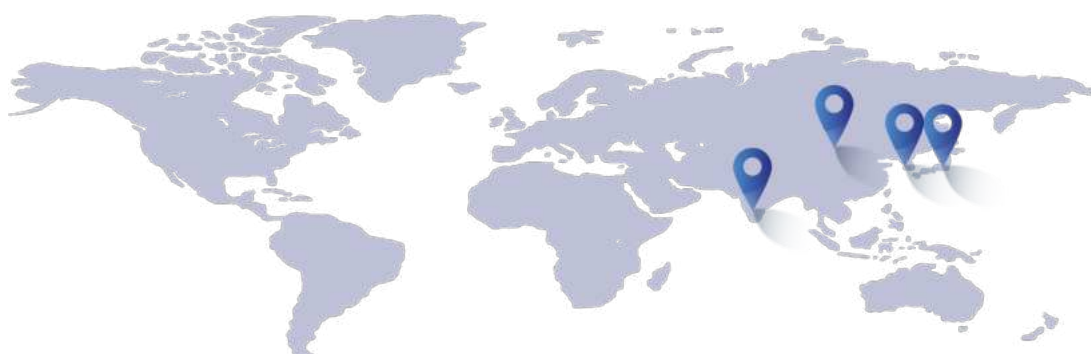
Untuk mendukung implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dan Inisiatif Strategis di Sistem Pembayaran, ASPI akan berkolaborasi secara intensif dengan anggota dan *stakeholders* terkait di sistem pembayaran melalui kegiatan berikut:

To support the implementation of the Indonesian Payment System Blueprint 2025 and Strategic Initiatives in the Payment System, ASPI plans to collaborate intensively with members and relevant stakeholders in the payment system through the following activities:



PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN QRIS

QRIS EXPANSION AND DEVELOPMENT



Sebagai usaha untuk memperkenalkan dan memperluas adaptasi QRIS di luar negeri, ASPI akan menjalin kerja sama pembayaran *QR Code* Antarneegara dengan Tiongkok, Jepang, Korea, dan India.

As an effort to introduce and expand QRIS adoption internationally, ASPI will establish cross border QR Code payment collaboration with China, Japan, Korea, and India.

PENGEMBANGAN ELEKTRONIFIKASI PEMBAYARAN

DEVELOPMENT OF PAYMENT ELECTRONIFICATION



Di tahun 2024 ASPI akan melanjutkan pengembangan *Online Payment* dengan metode tokenisasi dengan menggunakan sumber dana KKI segmen pemerintah.

Untuk memberikan berbagai pilihan yang beragam dan memfasilitasi transaksi pembayaran pada transportasi ASPI juga menargetkan pengembangan standar pembayaran nirsentuh dengan menggunakan teknologi NFC (*Mobile Tap*).

In 2024, ASPI will continue the development of Online Payments using tokenization method with funding from the government segment KKI.

To offer diverse options and to facilitate payment transactions in transportation, ASPI is also planning to develop contactless payment standards using NFC (mobile tap) technology.

MEMPERSIAPKAN STANDAR CONTACTLESS CARD

PREPARATION OF CONTACTLESS CARD STANDARDS



Untuk memaksimalkan penggunaan teknologi *chip* pada kartu pembayaran fisik dan membawa sistem pembayaran Indonesia setara dengan industri pembayaran di negara lain, ASPI mempersiapkan pengembangan standar kartu pembayaran berbasis teknologi nirsentuh (*contactless card*).

To maximize the use of chip technology on physical payment cards and to elevate Indonesia's payment system to be in the same level as other countries, ASPI is preparing the development of standards for contactless payment cards

PENYUSUNAN DAN PENERBITAN KETENTUAN OPERASIONAL

DEVELOPMENT AND ISSUANCE OF OPERATIONAL PROVISIONS

Di tahun 2024, ASPI akan menerbitkan ketentuan ASPI (KASPI) tentang:

- Layanan *BI-Fast* yaitu: *Individual Credit Transfer* (ICT) dan *Bulk Credit*, *Direct Debit*, *Request For Payment* (RFP),
- Ketentuan Penanganan Transaksi *Fraud*,
- Ketentuan Persyaratan Pendaftaran Penyedia Jasa Audit dan KASPI tentang Metodologi Penyedia Jasa Audit, dan
- Ketentuan KKI *Online Payment* dan NFC.

In 2024, ASPI will issue regulations regarding:

- BI FAST, including Individual Credit Transfer (ICT), Bulk Credit, Direct Debit, Request for Payment (RFP)
- Fraud transaction handling
- Requirements for Registration of Audit Service Providers and KASPI on Audit Service Provider's Methodologies
- KASPI on KKI Online Payment and NFC

PENDAFTARAN PENYEDIA JASA AUDIT TI DAN PENGUJIAN KEAMANAN

REGISTRATION OF IT AUDIT AND SECURITY TESTING SERVICE PROVIDERS



Di tahun 2024 ASPI akan menjalankan tugas pemrosesan daftar Penyedia Jasa Audit, dan sesuai Peraturan Bank Indonesia PJP (Program Indonesia Pintar) dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) hanya dapat menggunakan Penyedia Jasa Audit TI (auditor) yang namanya telah terdaftar pada laman ASPI.

In 2024, ASPI will carry out the task of processing the list of Audit Service Providers, and according to Bank Indonesia regulations, PJP (Program Indonesia Pintar) and Payment System Infrastructure Provider (PIP) can only use IT Audit Service Providers (auditors) whose names are registered in ASPI website.

PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)

ESTABLISHMENT OF PROFESSIONAL CERTIFICATION ORGANIZATION (LSP)

Sesuai arahan Bank Indonesia, ASPI akan mendirikan LSP untuk mendukung penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) guna memenuhi ketentuan UUP2SK dan Peraturan Bank Indonesia.

In accordance to Bank Indonesia's directive, ASPI will establish an LSP to support the implementation of competency certification in the area of Payment System and Rupiah Management (SPPUR) to comply with the provision of UUP2SK and Bank Indonesia regulations.

MEMBER ENGAGEMENT & COMMUNICATION

MEMBER ENGAGEMENT & COMMUNICATION

Dalam rangka meningkatkan kolaborasi pelaku sistem pembayaran dan memperkuat komunikasi dengan anggota, ASPI akan kembali melaksanakan serangkaian kegiatan yang meliputi antara lain *Executive Gathering*, *members forum*, Rapat Umum Anggota, serta berpartisipasi dalam FEKDI 2024.

To improve the collaboration of payment system stakeholders and strengthen communication with members, ASPI plans to carry out a series of activities which include Executive Gathering, members forum, General Meeting of Members, as well as well as participating in FEKDI 2024.



MELAKSANAKAN PROGRAM SOSIALISASI & EDUKASI

FAMILIARIZATION & EDUCATION PROGRAMS

ASPI akan mempersiapkan sosialisasi atas KASPI yang diterbitkan agar KASPI tersebut dapat dimengerti, dipahami dan diterapkan dengan benar.

ASPI will prepare dissemination of KASPI to ensure that it is understood, comprehended, and correctly implemented.

Guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap berbagai produk sistem pembayaran serta pemahaman akan risiko penipuan terhadap konsumen, ASPI akan melakukan sosialisasi dan literasi kepada masyarakat luas. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan Anggota ASPI.

To enhance awareness and knowledge of various payment system products and understanding of consumer fraud risk, ASPI will conduct literacy campaign. This can be done through collaboration with Bank Indonesia and ASPI members.

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT

Sejalan dengan bertambahnya tugas ASPI, ASPI akan merekrut sumber daya manusia dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan & kualitas karyawan ASPI.

In line with the increasing tasks of ASPI, ASPI will recruit human resources with the required competencies and provide training programs to improve the ability & quality of ASPI employees.

PROSES IMPROVEMENTS

PROCESS IMPROVEMENTS

Mengembangkan sistem internal secara berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi serta perbaikan layanan kepada anggotanya melalui proses otomasi.

Continuous development of internal systems to increase efficiency and improve services to members through automation processes.

05

TATA KELOLA ORGANISASI

ORGANIZATION
GOVERNANCE







ASPI berkomitmen untuk bekerja dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik. Salah satu implementasinya adalah dengan menyusun struktur tata kelola yang mampu memastikan terselenggaranya pengelolaan organisasi yang efektif, efisien, bersih, dan berintegritas.



ASPI memegang teguh prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Sebagai SRO, ASPI terbuka dan responsif terhadap aspirasi anggota dalam setiap proses pembuatan ketentuan dan standar industri sistem pembayaran yang harus dipatuhi dan mengikat bagi seluruh anggota. Setiap ketentuan ASPI dibuat dengan mengedepankan etika, kesetaraan, dan profesionalisme.



Prinsip akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab Badan Pengurus untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan organisasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. ASPI memiliki Badan Pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa Badan Pengurus senantiasa bekerja sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.



Setiap anggota Badan Pengurus, walaupun terpilih mewakili insitusi anggota, harus mampu menempatkan diri sebagai bagian dari Badan Pengurus ASPI, yang siap bekerja untuk memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi anggota dan industri sistem pembayaran, tanpa mendahulukan kepentingan institusinya.



Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas juga diterapkan dalam pengelolaan keuangan yang digunakan sebesar-besarnya untuk pengembangan standar sistem pembayaran dan kepentingan anggota. Laporan Keuangan ASPI diaudit oleh Akuntan Publik independen dan disampaikan ke Rapat Umum Anggota Tahunan untuk disetujui dan disahkan.

ASPI is committed to working by upholding the principles of good organizational governance, which includes developing a governance structure that is able to ensure the implementation of effective, efficient, and clean organizational management with high integrity.

ASPI upholds the principles of openness and accountability. As an SRO, ASPI is open and responsive to member aspirations in every process of establishing regulations and standards for payment system industry that must be adhered to and are binding for all members. Every ASPI provision is prepared by prioritizing ethics, equality, and professionalism.

The principle of accountability refers to the responsibility of the Management Board to ensure that duties and responsibilities in managing the organization are carried out in accordance with applicable regulations. ASPI has a Supervisory Board that carries out a supervisory function to ensure that the Management Board always works in accordance with the Articles of Association and applicable regulations.

Each member of the Management Board, although elected to represent a member institution, must be able to place themselves as part of the ASPI Management Board, which is ready to work to provide the maximum possible benefits for members and the payment system industry, without prioritizing the interests of their own institution.

The principles of openness and accountability are also applied in the management of finances which are used to the greatest extent for the development of payment system standards and the interests of members. ASPI's Financial Statements are audited by an independent Public Accountant and submitted to the Annual General Meeting of Members for approval and ratification.

RAPAT UMUM ANGGOTA

GENERAL MEETING OF MEMBERS

Sesuai dengan Anggaran Dasar, ASPI wajib menyelenggarakan Rapat Umum Anggota (RUA) Tahunan satu kali setiap tahun selambat-lambatnya bulan Juni. Agenda RUA Tahunan meliputi persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan, serta agenda lainnya yang dianggap perlu. Apabila diperlukan, ASPI dapat menyelenggarakan RUA Luar Biasa di luar RUA Tahunan, dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku.

In accordance with the Articles of Association, ASPI must hold an Annual General Meeting of Members (AGM) once every year no later than June. The agenda of the AGM includes approval of the Annual Report and ratification of the Financial Statements, as well as other agendas deemed necessary. If necessary, ASPI can hold an Extraordinary General Meeting outside the Annual General Meeting, by following the provisions stipulated in the Articles of Association and applicable regulations.

Pada tahun 2023, ASPI menyelenggarakan Rapat Umum Anggota (RUA) Tahunan dan RUA Luar Biasa (RUA – LB). RUA ASPI telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2023 yang pada saat perhitungan kuorum kehadiran jumlah anggota ASPI yang hadir sejumlah 148 anggota, yang merupakan 68.2% dari 217 anggota ASPI .

RUA ASPI 2023 membahas dan menyetujui beberapa agenda berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Badan Pengawas untuk tahun 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan ASPI untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Perubahan Anggaran Dasar ASPI;
3. Perubahan susunan anggota Badan Pengurus ASPI (Pengangkatan anggota Badan Pengurus ASPI).

Sesuai keputusan dalam RUA, susunan Badan Pengawas dan Badan Pengurus ASPI 2023 adalah sebagai berikut:

In 2023, ASPI held an Annual General Meeting of Members (AGM) and Extraordinary General Meeting (EGM). ASPI's AGM was held on June 23, 2023, which, at the time of calculating the attendance quorum, was attended by 148 ASPI members, or 68.2% of 217 ASPI members.

The 2023 AGM of ASPI discussed and approved the following agenda:

1. Approval of the Annual Report including the Supervisory Board Report for 2022 and Ratification of ASPI's Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2022;
2. Amendment to ASPI's Articles of Association;
3. Changes in the composition of the ASPI Management Board (Appointment of ASPI Management Board members).

As decided in the AGM, the composition of the Supervisory Board and Management Board of ASPI in 2023 is as follows:

BADAN PENGAWAS SUPERVISORY BOARD	
Ketua Badan Pengawas Chairman of Supervisory Board	Kartika Wirjoatmodjo
Anggota Member	Batara Sianturi
	Sunarso
	Hery Gunardi
	Supriyatno
Pengawas Independen Independent Supervisory Board	Rosmaya
BADAN PENGURUS MANAGEMENT BOARD	
Ketua Umum Chairman	Santoso
Wakil Ketua Umum Deputy Chairman	Corina Leyla Karnalies
Sekretaris Jenderal Secretary General	Handayani
Wakil Sekretaris Jenderal Deputy Secretary General	Riko Agus Surya Abdurrahman
Bendahara Treasurer	Henry Iswaratioso (Vincent)
Wakil Bendahara Deputy Treasurer	Eddy Hadiyanto
Ketua Komite 1 Chairman of Committee 1	Timothy Utama
Ketua Komite 2 Chairman of Committee 2	Abraham Jozef Adriaansz
Ketua Komite 3 Chairman of Committee 3	Ari Yanuanto Asah
Ketua Komite 4 Chairman of Committee 4	Soejanto Soetjijo
Ketua Komite 5 Chairman of Committee 5	Ardhi Wibowo



Sementara itu, RUA-LB ASPI diselenggarakan pada tanggal 24 November 2023 dengan dihadiri oleh 142 anggota (63.96%) yang terdiri dari 74 Anggota Biasa dan 68 Anggota Afiliasi, sehingga penyelenggaraan RUA-LB adalah sah.

Hasil keputusan RUA-LB adalah sebagai berikut:

Agenda 1 :

Menyetujui penyertaan ASPI sebagai pemegang saham pengendali, dalam pendirian Perseroan Terbatas Lembaga Sertifikasi Profesi, yang bergerak dalam kegiatan sertifikasi kompetensi di bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah ("PT LSP").

Agenda 2:

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Badan Pengurus ASPI untuk melakukan pengalihan sebagian dari penyertaan ASPI dalam PT LSP kepada asosiasi industri lainnya.

ASPI akan terus memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelenggaraan sertifikasi dan kompetensi bagi pelaku sistem pembayaran terutama turut serta dalam penguatan sumber daya manusia (SDM) di bidang sistem pembayaran agar dapat bersaing dengan SDM sistem pembayaran di negara lain.

Meanwhile, the EGM of ASPI was held on November 24, 2023, attended by 142 members (63.96%) consisting of 74 Regular Members and 68 Affiliate Members, indicating that the holding of the EGM was valid.

The EGM resolutions are as follows:

Agenda 1 :

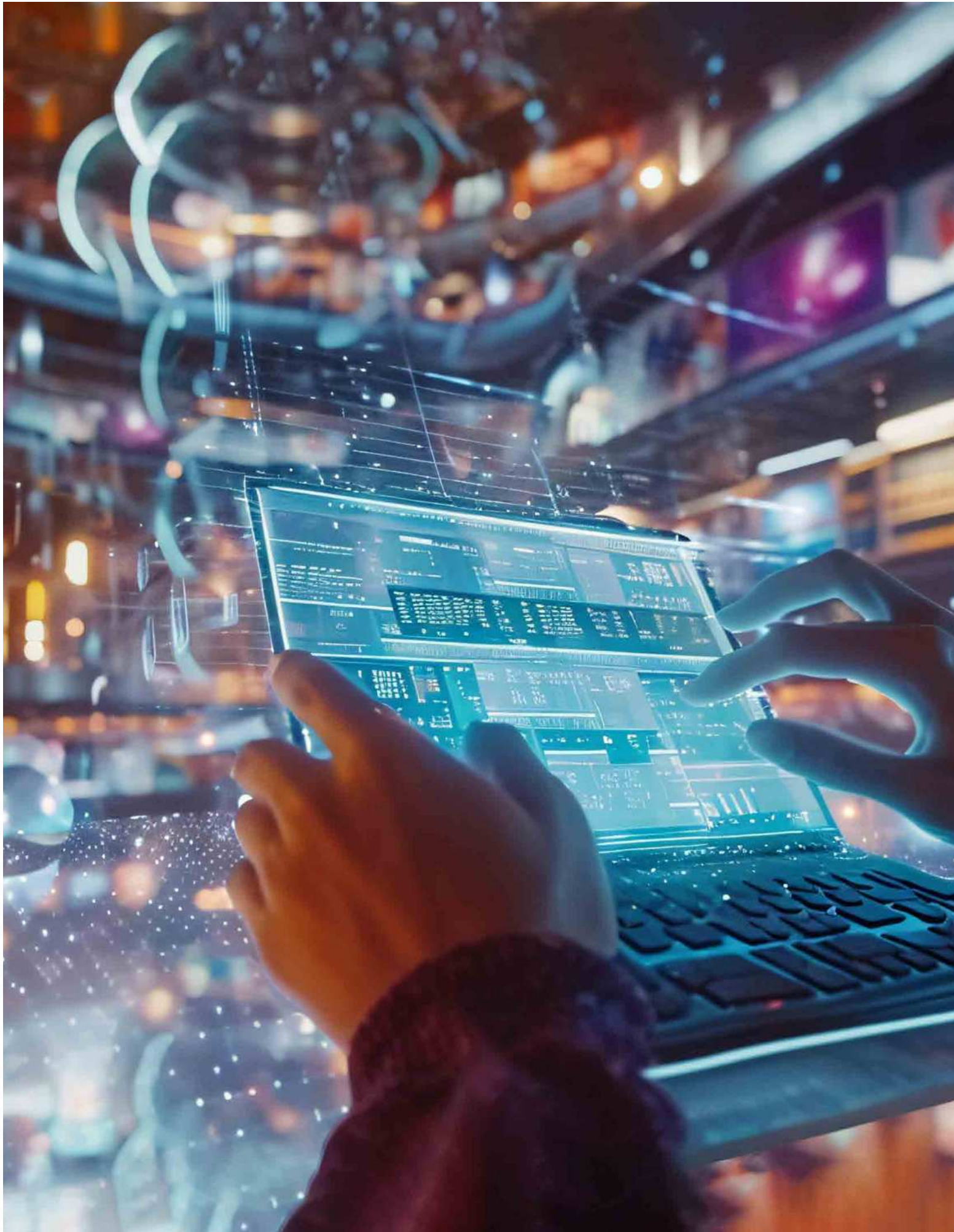
Approved the participation of ASPI as a controlling shareholder in the establishment of a Professional Certification Institute Limited Liability Company, which is engaged in competency certification activities in Payment Systems and Rupiah Money Management ("PT LSP").

Agenda 2:

Approved to authorize the Management Board of ASPI to transfer part of ASPI's participation in PT LSP to other industry associations.

ASPI will continue to provide support and contribution in organizing certification and competence for payment system actors, especially participating in strengthening human resources (HR) in payment systems to compete with payment system HR in other countries.





06

LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL
REPORT





1111.25	1125.25	1125.25	1125.25	1133.25
Low	EMA5	EMA5	EMA10	EMA10

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Pengurus	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan – Pada tanggal 31 Desember 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut	
Neraca	1
Laporan Perubahan Aset Bersih	2
Laporan Arus Kas	3
Catatan atas Laporan Keuangan	4 – 14

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023
ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Nama | : Santoso |
| Alamat kantor | : Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
Graha Mandiri Lt18
Jl Imam Bonjol No 61 |
| Alamat domisili sesuai KTP | : Kepa Duri Blok D 1/90 RT02/RW12
Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat |
| Nomor telepon | : 021-230 1947 |
| Jabatan | : Ketua Umum |
| 2. Nama | : Henry Iswaratioso |
| Alamat kantor | : Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
Graha Mandiri Lt18
Jl Imam Bonjol No 61 |
| Alamat domisili sesuai KTP | : Jl. Pluit Samudra V/44 RT07/RW05
Pluit Penjaringan
Jakarta Utara |
| Nomor telepon | : 021-230 1947 |
| Jabatan | : Bendahara |

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia.
2. Laporan keuangan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).
3.
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Pengurus,
Jakarta, 5 April 2024



Santoso
Ketua Umum



Henry Iswaratioso
Bendahara



Menara Kadin Indonesia 9th Floor
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 kav.2-3
Jakarta 12950 - Indonesia
Phone : (62-21) 5274426 (Hunting)
Fax : (62-21) 5274435, 8305901
E-mail : info@inpact.id
Website : inpact.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00047/2.1235/AU.2/11/1018-11/1/IV/2024

Pengurus

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ("Asosiasi"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2023, serta laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Asosiasi tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Asosiasi berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung jawab manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Asosiasi dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Asosiasi atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Asosiasi.

Tanggung jawab auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Asosiasi.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Asosiasi untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Asosiasi tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

TASNIM, FARDIMAN, SAPUAN, NUZULIANA, RAMDAN DAN REKAN

No. Izin Kantor : 642/KM.1/2018



Yana Nuzuliana, CA, CPA, CPI
Izin Akuntan Publik No. AP. 1018

5 April 2024



ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
NERACA

31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
ASET			
Aset lancar			
Kas dan setara kas	3	77.035.762.034	49.123.700.010
Piutang lain lain		24.020.000	-
Jumlah aset lancar		<u>77.059.782.034</u>	<u>49.123.700.010</u>
Aset tidak lancar			
Aset tetap - bersih	4	935.722.641	976.953.336
Aset tak berwujud	5	607.849.708	1.112.269.583
Jaminan	6	445.620.300	437.076.000
Jumlah aset tidak lancar		<u>1.989.192.649</u>	<u>2.526.298.919</u>
JUMLAH ASET		<u>79.048.974.683</u>	<u>51.649.998.929</u>
KEWAJIBAN			
Kewajiban jangka pendek			
Biaya yang masih harus dibayar	7	4.752.863.279	4.017.145.105
Hutang pajak	8a	6.857.588.330	3.793.950.559
Jumlah kewajiban jangka pendek		<u>11.610.451.609</u>	<u>7.811.095.664</u>
Kewajiban jangka panjang			
Liabilitas imbalan pasca-kerja	9	6.344.512.558	4.627.065.008
JUMLAH KEWAJIBAN		<u>17.954.964.167</u>	<u>12.438.160.672</u>
ASET BERSIH		<u>61.094.010.516</u>	<u>39.211.838.257</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH		<u>79.048.974.683</u>	<u>51.649.998.929</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023	2022
PENDAPATAN	10	54.382.392.922	37.122.887.519
BEBAN USAHA			
Beban proyek	11	(3.901.884.317)	(3.155.945.564)
Beban pemasaran dan penjualan		(318.980.883)	(173.672.706)
Beban umum dan administrasi	12	(23.244.208.937)	(19.623.005.574)
Jumlah beban usaha		(27.465.074.137)	(22.952.623.844)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan bunga bank (neto)		1.270.095.605	769.239.397
Beban lain-lain		(5.419.591)	(23.097.997)
Penghasilan lain-lain - bersih		1.264.676.014	746.141.400
KENAIKAN ASET BERSIH		28.181.994.799	14.916.405.075
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	8b	(6.299.822.540)	(2.946.537.902)
KENAIKAN ASET BERSIH SETELAH PAJAK		21.882.172.259	11.969.867.173
ASET BERSIH AWAL PERIODE		39.211.838.257	27.241.971.084
ASET BERSIH AKHIR PERIODE		61.094.010.516	39.211.838.257

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Kenaikan (penurunan) aset bersih setelah pajak	21.882.172.259	11.969.867.173
Penyesuaian untuk:		
Penyusutan	483.402.759	463.087.556
Amortisasi	504.419.875	505.582.375
Imbalan pasca-kerja	1.837.754.165	(250.979.642)
Pembayaran imbalan pasca-kerja	(120.306.615)	(63.000.000)
Perubahan aset bersih:		
Piutang lain lain	(24.020.000)	10.531.050
Jaminan	(8.544.300)	
Hutang pajak	3.063.637.771	1.055.380.744
Beban yang masih harus dibayar	735.718.174	2.573.370.272
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	<u>28.354.234.088</u>	<u>16.263.839.528</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap	(442.172.064)	(16.122.297)
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	<u>(442.172.064)</u>	<u>(16.122.297)</u>
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	27.912.062.024	16.247.717.231
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	49.123.700.010	32.875.982.779
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	<u>77.035.762.034</u>	<u>49.123.700.010</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. GAMBARAN UMUM ASOSIASI

a. Pendirian Asosiasi

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ("Asosiasi") disingkat ASPI dalam bahasa Inggris disebut *The Indonesia Payment System Association* di singkat IPISA didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris DR. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM No. 10 tanggal 20 Oktober 2010 di Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh seluruh anggota ASPI dalam Rapat Umum Anggota (RUA) tanggal 28 Oktober 2011, untuk didaftarkan sebagai perkumpulan yang berbadan hukum ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan akta yang telah disusun kembali oleh Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Jakarta selaku protokol dari DR. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM., di bawah akta No. 21 tanggal 16 Desember 2011. Akta pendirian telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-227.A.H.01.06. Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011. Anggaran Dasar mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Christina Dwi Utami SH, MHum, MKn No. 302 tanggal 23 Juni 2023 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0000987.AH.01.08. Tahun 2023.

Asosiasi ini memiliki peran, tugas dan fungsi membuat ketentuan dalam industri sistem pembayaran yang mampu mewadahi berbagai perubahan dan dinamika yang terjadi dalam industri sistem pembayaran dengan tetap memperhatikan peraturan dan kebijakan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran.

Asosiasi berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung Graha Mandiri Lantai 18 Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat 10310.

b. Ruang Lingkup Asosiasi

Ruang lingkup dan kegiatan Asosiasi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran pelaku sistem pembayaran di Indonesia dalam mewujudkan industri sistem pembayaran yang lebih efisien dan menyusun ketentuan yang bersifat mikro dan teknis dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.
- b. Wadah bagi kepentingan segenap pelaku sistem pembayaran di Indonesia dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, baik yang terkait dengan hubungan antar anggota ASPI maupun hubungan ASPI dengan Bank Indonesia dan otoritas terkait lainnya.
- c. Mitra Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran guna mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal.

c. Keanggotaan Asosiasi

ASPI beranggotakan bank dan lembaga selain bank pelaku sistem pembayaran yang berbentuk badan hukum dan telah mendapat izin dari Bank Indonesia atau instansi yang berwenang.

Pada tahun 2023 dan 2022, Asosiasi mempunyai anggota masing-masing sebanyak 224 anggota dan 217 anggota.

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. GAMBARAN UMUM ASOSIASI (Lanjutan)

d. Susunan dan Tugas Pengurus Asosiasi

Berdasarkan akta notaris Christina Dwi Utami, S.H., MHum., MKn, No. 301 tanggal 23 Juni 2023 dan telah disetujui oleh seluruh anggota ASPI dalam Rapat Umum Anggota tanggal tanggal 23 Juni 2023 tentang Perubahan Susunan Badan Pengurus dan Badan Pengawas Asosiasi telah didaftarkan dan disetujui oleh seluruh Anggota ASPI sebagai perkumpulan yang berbadan hukum ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000986.AH.01.08.Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Ketua Umum	: Santoso	Santoso
Wakil Ketua	: Corina Leyla Karnalies	Hariantono
Sekjen	: Drg. Handayani	Drg. Handayani
Wakil Sekjen	: Riko Agus Surya Abdurrahman	Riko Agus Surya Abdurrahman
Bendahara	: Henry Iswaratioso	Henry Iswaratioso
Wakil Bendahara	: Ir. Eddy Hadiyanto M.B.A.	Ir. Eddy Hadiyanto M.B.A.
Ketua Komite I	: Timothy Utama	Timothy Utama
Ketua Komite II	: Abraham J. Adriaansz	Abraham J. Adriaansz
Ketua Komite III	: Ari Yuanto Asah	Ari Yuanto Asah
Ketua Komite IV	: Soejanto Soetjijo	Soejanto Soetjijo
Ketua Komite V	: Ardhi Wibowo	Ardhi Wibowo
Direktur Eksekutif	: Susiana Suhendra	Susiana Suhendra
Direktur Eksekutif	: Djamin Edison Nainggolan	Djamin Edison Nainggolan
Direktur Eksekutif	: Yanti Puspa Rini	Yanti Puspa Rini

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Asosiasi telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada 1 Januari 2011. Oleh karena itu laporan keuangan tahun 2023 disajikan berdasarkan SAK ETAP.

Manajemen Asosiasi berpendapat bahwa laporan keuangan tahun 2023 dengan angka komparatif 2022 telah disajikan sesuai dengan SAK ETAP dan telah memenuhi semua persyaratannya.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pembayaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Piutang luran

Piutang iuran disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih, yang diestimasi berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas saldo piutang. Piutang dihapuskan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih.

d. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.

Biaya perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap. Setelah pengakuan awal, aset tetap diukur dengan model biaya.

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan perlengkapan kantor	4 - 8 tahun
Pengembangan ruang gedung yang disewa	8 tahun

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya penggantian komponen suatu aset dan biaya inspeksi yang signifikan diakui dalam jumlah tercatat aset jika memenuhi kriteria untuk diakui sebagai bagian dari aset. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dibukukan dalam laporan perubahan aset bersih tahun yang bersangkutan.

e. Perpajakan

Asosiasi mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Asosiasi harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Asosiasi tidak mengakui adanya pajak tangguhan. Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika Asosiasi mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

f. Imbalan Pasca Kerja

Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU 13/2003") sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ("UU6/2023"), Perusahaan disyaratkan untuk memberikan imbalan pensiun sekurang-kurangnya seperti imbalan pensiun yang diatur dalam UU 6/2023, yang pada dasarnya adalah program imbalan pasti. UU 6/2023 menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun.

**ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

f. Imbalan Pasca Kerja (Lanjutan)

Kewajiban imbalan pasca-kerja yang diakui di laporan posisi keuangan dihitung berdasarkan nilai kini dari estimasi kewajiban imbalan pasca-kerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar aset bersih dana pensiun. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan metode *Projected unit-credit*.

Ketika imbalan pasca-kerja berubah, porsi kenaikan atau penurunan imbalan sehubungan dengan jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa lalu dibebankan atau dikreditkan ke dalam laporan perubahan aset bersih dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight line - method*) selama rata-rata sisa masa kerja karyawan hingga imbalan pasca-kerja menjadi hak karyawan (*Vested*). Imbalan pasca-kerja menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan perubahan aset bersih..

Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial bersih yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasca-kerja pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian diakui dengan menggunakan metode garis lurus selama sisa masa kerja rata rata karyawan. Jika tidak, keuntungan atau kerugian aktuarial tidak diakui.

g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pengakuan pendapatan iuran anggota didasarkan pada akrual basis, yaitu pendapatan suatu periode diakui sebagai pendapatan walaupun belum diterima pembayaran per kas.

Pengakuan pendapatan MDR debit dan QRIS didasarkan pada kas basis yaitu pendapatan diakui saat adanya penerimaan pada bank.

Beban diakui berdasarkan akrual basis yaitu beban diakui pada saat penerimaan manfaat walaupun belum ada pengeluaran kas atau bank.

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS

	2023	2022
Bank		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	41.910.524.657	21.308.890.390
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	16.696.128.658	11.382.399.002
PT Bank Central Asia Tbk	2.999.567.372	1.489.633.046
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	640.460.177	612.661.901
Jumlah Bank	<u>62.246.680.864</u>	<u>34.793.584.339</u>
Deposito berjangka		
PT Bank DKI	13.979.347.907	13.539.667.914
PT Bank CIMB Niaga Syariah	809.733.263	790.447.757
Jumlah Deposito berjangka	<u>14.789.081.170</u>	<u>14.330.115.671</u>
Jumlah	<u>77.035.762.034</u>	<u>49.123.700.010</u>
 Tingkat suku bunga per tahun	 4,25% - 5%	 3% - 4%

4. ASET TETAP

	2023			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Harga Perolehan				
Peralatan dan perlengkapan kantor	1.664.213.152	442.172.064	-	2.106.385.216
Pengembangan ruangan gedung yang disewa	1.168.498.790	-	-	1.168.498.790
Jumlah	<u>2.832.711.942</u>	<u>442.172.064</u>	<u>-</u>	<u>3.274.884.006</u>
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan dan perlengkapan kantor	1.008.037.212	382.104.634	-	1.390.141.846
Pengembangan ruangan gedung yang disewa	847.721.394	101.298.125	-	949.019.519
Jumlah	<u>1.855.758.606</u>	<u>483.402.759</u>	<u>-</u>	<u>2.339.161.365</u>
Nilai Buku	<u>976.953.336</u>			<u>935.722.641</u>

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. ASET TETAP (Lanjutan)

	2022			Saldo akhir
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Peralatan dan perlengkapan kantor	1.648.090.855	16.122.297	-	1.664.213.152
Pengembangan ruangan gedung yang disewa	1.168.498.790	-	-	1.168.498.790
Jumlah	<u>2.816.589.645</u>	<u>16.122.297</u>	<u>-</u>	<u>2.832.711.942</u>
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan dan perlengkapan kantor	664.899.541	343.137.671	-	1.008.037.212
Pengembangan ruangan gedung yang disewa	727.771.509	119.949.885	-	847.721.394
Jumlah	<u>1.392.671.050</u>	<u>463.087.556</u>	<u>-</u>	<u>1.855.758.606</u>
Nilai Buku	<u>1.423.918.595</u>			<u>976.953.336</u>

Beban penyusutan sebesar Rp 483.402.759 dan Rp 463.087.556 pada tahun 2023 dan 2022 dibebankan pada beban umum dan administrasi (Catatan 12).

5. ASET TAK BERWUJUD

	2023			Saldo akhir
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Perangkat lunak	2.617.779.000	-	-	2.617.779.000
Akumulasi Penyusutan				
Perangkat lunak	1.505.509.417	504.419.875	-	2.009.929.292
Nilai Buku	<u>1.112.269.583</u>			<u>607.849.708</u>

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. ASET TAK BERWUJUD (Lanjutan)

	2022			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Harga Perolehan				
Perangkat lunak	2.617.779.000	-	-	2.617.779.000
Akumulasi Penyusutan				
Perangkat lunak	999.927.042	505.582.375	-	1.505.509.417
Nilai Buku	1.617.851.958			1.112.269.583

Aset tidak berwujud memiliki umur manfaat selama 8 tahun dengan menggunakan tarif 12,5 % dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

6. JAMINAN

	2023	2022
Sewa	436.620.300	428.076.000
Telepon	9.000.000	9.000.000
Jumlah	445.620.300	437.076.000

7. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2023	2022
Bonus	2.170.428.950	1.567.093.075
Beban EAG	2.129.085.329	-
Jasa profesional	453.349.000	2.305.750.000
Lain-lain	-	144.302.030
Jumlah	4.752.863.279	4.017.145.105

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PERPAJAKAN

a. Hutang Pajak

	2023	2022
PPN	355.808.675	172.178.149
PPH pasal 4 (2)	29.013.000	28.500.000
PPH pasal 21	1.170.781.767	882.697.310
PPH pasal 23	27.120.633	8.893.041
PPH pasal 25	243.036.031	21.573.699
PPH pasal 29	5.031.828.224	2.680.108.360
Jumlah hutang pajak	<u>6.857.588.330</u>	<u>3.793.950.559</u>

b. Pajak Kini

	2023	2022
Kenaikan aset bersih	28.181.994.799	14.916.405.075
Beda tetap		
Imbalan pasca-kerja	1.717.447.550	(313.979.642)
Beban pengobatan	-	442.068.671
Beban pulsa telepon selular	-	5.500.000
Penyusutan aset tetap	599.854	498.313
Pendapatan bunga bank dan deposito	(1.270.095.605)	(748.370.704)
Beban lain - lain	5.611.071	16.963.530
Penghasilan kena pajak	<u>28.635.557.669</u>	<u>14.319.085.243</u>
Pembulatan	28.635.557.000	14.319.085.000
Perhitungan taksiran pajak penghasilan		
Fasilitas	-	1.851.461.796
Tanpa fasilitas	<u>28.635.557.000</u>	<u>12.467.623.204</u>
Jumlah pendapatan kena pajak		14.604.085.000
Beban pajak		
Fasilitas	-	203.660.798
Tanpa fasilitas	<u>6.299.822.540</u>	<u>2.742.877.105</u>
Jumlah beban pajak kini	<u>6.299.822.540</u>	<u>2.946.537.902</u>
Kredit pajak		
PPH pasal 23	15.700.000	34.240.000
PPH pasal 25	<u>1.252.294.316</u>	<u>232.189.542</u>
Jumlah Kredit Pajak	<u>1.267.994.316</u>	<u>266.429.542</u>
Jumlah Kurang/(Lebih) Bayar Pajak	<u><u>5.031.828.224</u></u>	<u><u>2.680.108.360</u></u>

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA

Penilaian kewajiban manfaat pegawai dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria Kantor Konsultan Aktuaria Padma Aktuarial Consulting per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan perhitungan sebagai berikut:

	2023	2022
Tingkat diskonto	6,50%	6,50%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	4%	4%
Usia pensiun normal (tahun)	55 Tahun	55, 60, dan 67 Tahun
Mortality	100% TMI4	100% TMI4

Rekonsiliasi aset (liabilitas) manfaat kesejahteraan karyawan adalah sebagai berikut:

Jumlah liabilitas yang belum diakui di neraca:

	2023	2022
Nilai kini liabilitas manfaat karyawan	6.344.512.558	4.627.065.008
Nilai wajar aset program manfaat karyawan	-	-
Liabilitas program manfaat karyawan	<u>6.344.512.558</u>	<u>4.627.065.008</u>

Beban manfaat karyawan pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Beban jasa kini	1.644.526.425	959.754.846
Beban jasa lalu	57.714.803	(1.015.999.319)
Beban bunga	68.970.286	213.632.647
Perubahan metode perhitungan	-	(39.272.821)
Keutungan aktuarial	66.542.651	(369.094.995)
Jumlah	<u>1.837.754.165</u>	<u>(250.979.642)</u>

Perubahan pada liabilitas yang diakui di neraca:

	2023	2022
Kewajiban awal tahun	4.627.065.008	4.941.044.650
Pembayaran manfaat	(120.306.615)	(63.000.000)
Beban imbalan kerja yang dapat diakui pada tahun	1.837.754.165	(250.979.642)
Liabilitas akhir tahun	<u>6.344.512.558</u>	<u>4.627.065.008</u>

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PENDAPATAN

	2023	2022
MDR qris	23.583.486.115	6.076.256.228
MDR debit	18.959.906.807	17.416.631.291
Iuran anggota	6.705.000.000	6.745.000.000
Fungsi sertifikasi	4.184.000.000	5.375.000.000
NSICC specification	950.000.000	1.510.000.000
Jumlah	54.382.392.922	37.122.887.519

11. BEBAN PROYEK

	2023	2022
<i>Executive gathering</i>	2.151.013.383	2.697.484.421
Rapat umum anggota	999.740.153	458.461.143
Rapat kerja	577.009.581	-
Sosialisasi	174.121.200	-
Jumlah	3.901.884.317	3.155.945.564

12. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2023	2022
Gaji dan upah	14.718.663.930	12.433.329.024
Imbalan Pascakerja	1.837.754.165	(250.979.642)
Jasa professional	1.299.792.718	2.350.969.543
Sewa	1.160.520.000	1.140.000.000
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	810.779.317	636.199.109
Amortisasi (Catatan 5)	504.419.875	505.582.375
Penyusutan (Catatan 4)	483.402.759	463.087.556
Pemeliharaan	479.120.200	560.326.000
Alokasi kesehatan	385.112.601	442.068.671
Pelatihan	368.512.434	276.470.287
Internet	282.216.774	164.443.000
Alat tulis dan kebutuhan kantor	171.382.039	103.393.071
Rapat kantor	162.230.523	186.755.804
Pengiriman surat dan dokumen	87.898.595	73.594.976
Transportasi	49.346.532	26.670.010
Telepon	8.239.585	19.614.333
Lain-lain	434.816.890	491.481.457
Jumlah	23.244.208.937	19.623.005.574

**ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. LIABILITAS KONTINJENSI

Asosiasi tidak mempunyai liabilitas kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2023.

14. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Asosiasi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan terlampir yang telah diselesaikan pada tanggal 5 April 2024.



2023

Laporan Tahunan
Annual Report



a

Sekretariat ASPI

Gd. Graha Mandiri Lt. 18
Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta Pusat 10310
(62-21) 230 1947
sekretariat@aspi-indonesia.or.id

www.aspi-indonesia.or.id